

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TELUK RHU  
KECAMATAN RUPAT UTARA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**

**Saharah**

**Npm : 147110693**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2020**

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**Dokumen ini adalah Arsip Miik :**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Saharah  
NPM : 147110693  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 30 oktober 2020  
Ketua, Sekretaris,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Eka Komalasari, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “ Analisis Fingsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis” proposal ini merupakan salah satu syarat guna mendapat gelar sarjana strata satu bidang ilmu sosial program studi administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Islam Riau.

Proposal ini tidak berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, secara moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang bapak pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Lilis Suryani S,Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan dengan sabar dan untuk meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

5. Ibu Eka Komalasari, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang tidak bosan-bosannya meluangkan waktunya untuk penulis berkonsultasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian.
7. Teristimewa buat kedua orang Tua saya, ayahanda Tengku Muhammad Saleh dan Ibunda Hapisah yang telah bersusah payah membesarkan, merawat, membina, membimbing mendidik dan menyekolahkan serta selalu mendoakan dan memberi perhatian bahkan semangat dan dukungannya baik moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini. Dan juga buat saudara kandung saya yang tercinta atas dukungannya yaitu Tengku Muhammad Basyar, Sunarti, Tengku Muhammad Junaidi Saputra dan Tengku Muhammad Khairi terima kasih atas konsultasinya.
8. Rekan-rekan seperjuangan umumnya Program Studi Administrasi Publik angkatan 2014 kelas F , dan khususnya buat sahabat-sahabat yang saya sayangi yang selalu mendukung dan saling memberi semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
9. Dan juga buat sahabat-sahabat saya Lely Hernayanti, Rima Dazira dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu saya ucapkan ribuan

terima kasih karena selalu memberi suport serta bantuannya dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari pula bahwa Usulan Penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa.

Pekanbaru, 13 oktober 2020

Penulis

Ttd

Saharah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	23
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	23
1. Tujuan Penelitian .....	23
2. Kegunaan penelitian .....	24
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>25</b>
A. Studi Kepustakaan .....	25
1. Konsep Administrasi .....	25
2. Konsep organisasi .....	28
3. Konsep Manajemen .....	30
4. Konsep Pemimpin.....	34
5. Konsep Kepemimpinan.....	35
6. Konsep Sumber Daya Manusia.....	43
7. Konsep Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Tentang Desa.....	45
B. Kerangka Pikir .....	50
C. Hipotesis .....	51
D. Konsep Operasional .....	52
E. Operasional Variabel.....	54
F. Teknik Pengukuran Penelitian .....	55

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Tipe Penelitian .....	60
B. Lokasi Penelitian .....	61
C. Populasi dan Sampel .....	61
D. Teknik penarikan sampel .....	62
E. Jenis dan Sumber Data .....	63
F. Teknik Pengumpulan Data .....	64
G. Teknik Analisis Data dan uji hipotesis .....	65
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	66
I. Rencana sistematika laporan penelitian .....	67
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	69
B. Sejarah Berdirinya Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.....	72
C. Keadaan dan Komposisi Penduduk Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis .....	75
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis .....	76
E. Sejarah Kantor Desa Teluk Rhu .....	79
F. Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi .....	81
G. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara .....	88

H. Sarana dan Prasarana Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis .....	92
--	----

**BAB V : HASIL HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	95
B. Analisa Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa utara kabupaten bengkalis .....	98
1. Pemimpin Sebagai Penentu Arah .....	99
2. Pemimpin Sebagai Wakil Dan Juru Bicara .....	104
3. Pemimpin Sebagai Komunikator .....	110
4. Pemimpin Selaku Mediator .....	116
5. Pemimpin Selaku Integrator .....	121
C. Faktor-faktor Penghambat yang Mempengaruhi analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis .....	135

**BAB VI : PENUTUP** ..... 137

A. Kesimpulan .....	138
B. Saran .....	139



## DAFTAR TABEL

Tabel		Hlm
I.1	: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara.....	12
I.2	: Jenis pembangunan fisik di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis.....	15
I.3	: Jumlah Daftar Hadir Dalam Rapat Musyawarah Pembangunan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis.....	18
I.4	: Jenis Dan Sumber Dana Pembangunan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis.....	20
II.1	: Analisis Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis.....	54
III.1	: Keadaan Populasi Dan Sampel Penelitian Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis.....	62
IV.1	: Jumlah Penduduk Desa Teluk Rhu dilihat Menurut Jenis Kelamin.....	75
IV.2	: Komposisi Perangkat Desa Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis .....	76
IV.3	: Pegawai Kantor Desa Teluk Rhu Menurut Jenis Kelamin.....	90
IV.4	: Keadaan Komposisi Pegawai Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Pendidikan .....	91
IV.5	: Keadaan Komposisi Pegawai Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	92
IV.6	: Sarana Dan Prasarana Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara .....	93
V.1	: Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Mengenai Analisi Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis.....	96
V.2	: Distribusi Responden Mengenai Analisi Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis .....	97
V.3	: Distribusi Responden Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Mengenai Analisi Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Kabupaten Bengkalis .....	98
V.4	: Tanggapan Responden Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Staf Desa, Ketua BPD Dan LKMD/LPM Berdasarkan Pemimpin Sebagai Penentu Arah.....	100
V.5	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa <sup>t</sup> Utara Berdasarkan Pemimpin Sebagai Penentu Arah.....	101
V.6	: Tanggapan Responden Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur	

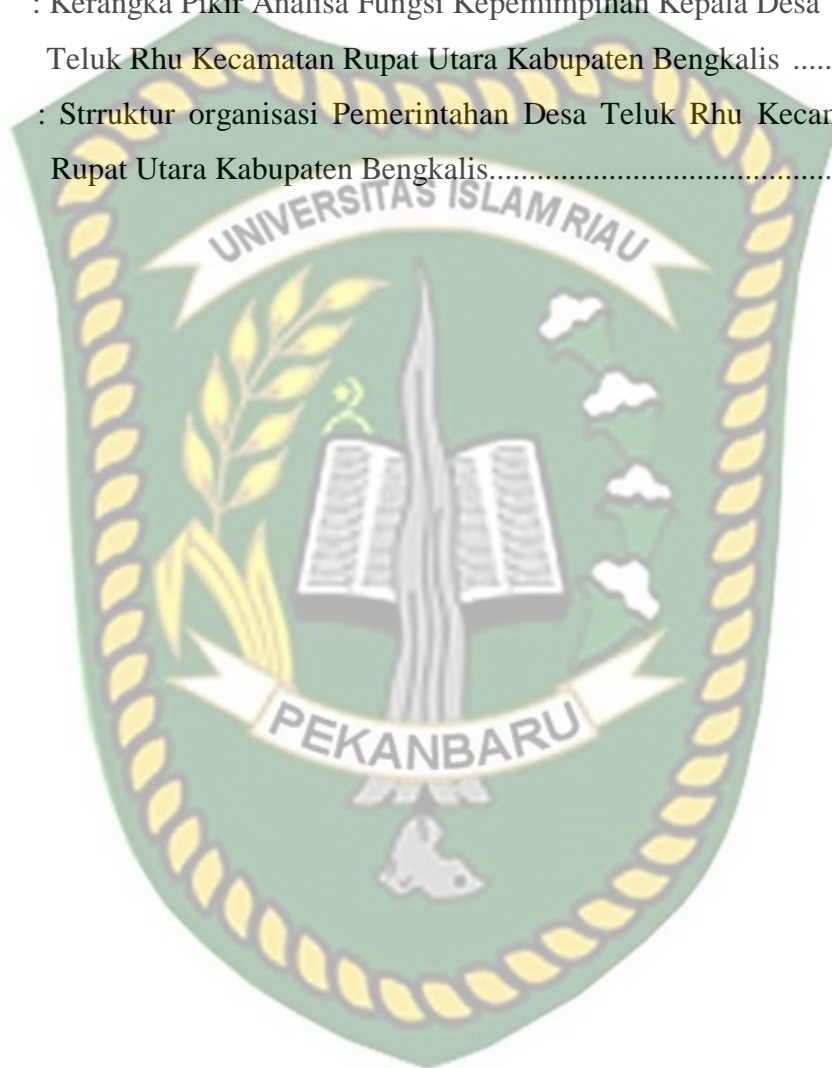
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	Umum, Staf Desa, Ketua BPD Dan LKMD/LPM Berdasarkan Pemimpin Sebagai Wakil Dan Juru Bicara.....	106
V.7	: Tanggapan Responden Masyarakat Berdasarkan Pemimpin Sebagai Wakil Dan Juru Bicara.....	107
V.8	: Tanggapan Responden Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Staf Desa, Ketua BPD Dan LKMD/LPM Berdasarkan Pemimpin Sebagai Komunikator.....	112
V.9	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pemimpin Sebagai Komunikaor.....	113
V.10	: Tanggapan Responden Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Staf Desa, Ketua BPD Dan LKMD/LPM Berdasarkan Pemimpin Selaku Mediator.....	117
V.11	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pemimpin Selaku Mediator.....	119
V.12	: Tanggapan Responden Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Staf Desa, Ketua BPD Dan LKMD/LPM Berdasarkan Pemimpin Sebagai integritor .....	126
V.13	: Tanggapan Responden Masyarakat tentang Pemimpin selaku Integritor.....	127
V.14	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Staf Desa, Ketua BPD Dan LKMD/LPM terhadap analisis fungsi kepemimpinan kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rumat Utara Kabupaten Bengkalis .....	130
V.15	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Ruapat Utara Kabupaten Bengkalis.....	133

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hlm
II.1 : Kerangka Pikir Analisa Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis .....	51
IV.2 : Struktur organisasi Pemerintahan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.....	78



## Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis

### ABSTRAK

OLEH : Saharah

*Kata Kunci : Fungsi, Kepemimpinan, Kepala Desa*

Subtansi mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Fungsi Kepemimpinan (adair pasalong) yakni dengan indikator pemimpin selaku penentu arah, pemimpin selaku wakil juru bicara, pemimpin sebagai komunikator, pemimpin sebagai mediator, dan pemimpin sebagai integrator. Metode penelitian ini adalah *survey deskriptif* dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 585 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *teknik random sampling* untuk pegawai dan juga masyarakat desa teluk rhu tersebut, sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan sebanyak 68 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis di kategorikan belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini masih ditemui faktor-faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana yang kurang dijaga atau dirawat, hubungan yang kurang terjalin dengan baik, kurang memiliki komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, serta kurangnya peranan kepala desa dalam menyelesaikan konflik.

## **Analysis of the Leadership Function of the Head of Teluk Rhu Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency**

### **ABSTRACT**

BY: Saharah

*Keywords: Function, Leadership, Village Head*

Substance regarding the Analysis of the Leadership Function of the Head of Teluk Rhu Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency. The purpose of this study was to determine the leadership function of the Head of Teluk Rhu Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency and to determine the supporting and inhibiting factors of the Leadership Function of the Head of Teluk Rhu Village, Rupert Utara District Bengkalis Regency. The theory used in this study is the theory of Leadership Functions (adair babong) that is with indicators of leaders as determining direction, leaders as deputy spokespersons, leaders as communicators, leaders as mediators, and leaders as integrators. This research method is a descriptive survey using quantitative methods. The population in this study was 585 people. The sampling technique in this study used a random sampling technique for employees and also the village of the village of Rhu Bay, the sample in this study the authors set as many as 68 people. The results showed that the Analysis of Leadership Function of the Head of Teluk Rhu Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency was categorized as not going well and maximally. This is still encountered by inhibiting factors, namely facilities and infrastructure that are poorly maintained or cared for, relationships that are not well established, lack of good communication with various parties, and lack of the role of village heads in resolving conflicts.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saharah  
NPM : 147110693  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak Karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 oktober 2020  
Pelaku Pernyataan,

Saharah

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Administrasi sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, secara eksplisit tergambar administrasi yaitu suatu bentuk budaya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Keseluruhan proses administrasi bertitik tolak dari manusia dan akan diakhiri oleh manusia pula, oleh karenanya dalam menganalisa administrasi, manusia perlu mendapatkan perhatian yang utama.

Organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan menurut siagian ( dalam zulkifli,2005;127).

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki atau sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah

dengan mengukur seberapa besar kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintah sendiri.

Manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi adalah sangat penting, karena tanpa manajemen memberikan efektivitas pada usaha manusia. Fokus study Manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan lokusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi yang akan dikembangkan. Kedua hal ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis dalam organisasi. Oleh karena itu, penelaahan terhadap setiap fungsi manajemen umumnya tertuju kepada peran sumber daya manusia sebagai pengguna dan pengelola sumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu persoalan pengelolaan sumberdaya oleh manajemen desa.

Adapun prinsip-prinsip umum yang tercermin dalam UUD 1945 bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali, selalu ada masalah antara pusat dan daerah, salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan antar pusat dan daerah. Ketika kita membahas urusan pemerintahan pusat dan daerah, peraturan yang bisa menjadi pegangan bagi kita adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.



Urusan pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Absolut
2. Urusan Pemerintahan Konkuren
3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Defenisi pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, defenisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal serta agama.

Meski sepenuhnya berada di tangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertical yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertical sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, contoh instansi vetical didaerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti dinas dan badan daerah.

Urusan pemerintahan kedua adalah Urusan Pemerintahan Konkuren. Defenisinya adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar peaksanaan otonomi daerah. Pembagian ini mencakup

berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatanan territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintas Negara ataupun lintas Daerah Provinsi, sedang Provinsi berapa pada lintas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tingkat kota/kabupaten berada pada area dalam kota/kabupaten.

Urusan pemerintahan ketiga yang ada dalam Undang-Undang ini adalah Urusan Pemerintahan Umum, defenisinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum adalah Gubernur dan walikota serta bupati di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertical. Pertanggung jawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur. Hal ini

karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan sendiri berasal dari APBN.

Ketiga urusan di atas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik daerah. Sedangkan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, kemudian diakui oleh pemeritahan kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perkehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer Haar, masyarakat hukum adat memiliki tiga komponen yaitu:

1. Sekumpulan orang yang teratur
2. Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap
3. Memiliki kekuatan yang mengurus harta benda

Dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman teknis peraturan didesa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kemasyarakat. Pelayanan tersebut diantaranya terdiri atas pelayanan public, pelayanan publik yang dimaksud ialah berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, sektor publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, publik yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Dalam konteks pemerintahan desa, publik disini maksud nya adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah/desa dengan mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintahan desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Administrasi sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, secara eksplisit tergambar administrasi yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalisme yang tinggi. Keseluruhan proses administrasi bertitik tolak dari manusia, berorientasi manusia, dimaksudkan untuk kepentingan manusia dan akan diakhiri oleh manusia pula, oleh karenanya dalam menganalisa administrasi, manusia perlu mendapat perhatian yang utama. Sedangkan organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapatseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/beberapa kelompok yang disebut bawahan menurut siagian (dalam zulkifli,2005;127).

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa pada pasal 1 ayat 1 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014).

Tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 14 yang berbunyi :

- 1) Kepala desa mempunyai tugas dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa apbdes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa
  - f. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
  - g. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
  - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 –pasal 26 Ayat (1) berbunyi:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam ayat 2 yaitu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan daerah;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima perampasan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Menurut undang- undang desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3 berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Selanjutnya lagi pada Undang-undang Desa 2014 pasal 4 berbunyi, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangarn;
- e. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan Gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan desa yang akuntabel, Transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kemudian dalam Pasal 27 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. Membereikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan



- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasikan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.

Lebih lanjut pada UU Desa 2014 pasal 28 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberitahuan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam UU Desa tahun 2014 pasal 29, dinyatakan Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan perwakilan daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 30 yang berbunyi :

1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat didesa untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu koperasi, namun apabila untuk menunjang berjalannya kegiatan yang ada pada desa Teluk Rhu harus juga didukung dengan sumber daya manusia yang berada pada desa Teluk Rhu supaya setiap kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan maksimal dan juga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan.

Untuk mengetahui secara rinci pembangunan-pembangunan bebrapa tahun terakhir didesa Teluk Rhu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.1 : jenis pembangunan fisik di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018**

No	Jenis Pembangunan	Tahun Anggaran	Jumlah Unit	Sumber Dana
1	Jembatan jalan ismail Rehabilitas kantor MDA Parit Beton Kator Desa Pembuatan Gudang Kantor (dll)	2014	1 Kelas  1 Unit	APBD
2	Semenisasi jl. Abu naim Semenisasi jl. Delima Gorong-gorong posyasndu samudra III(dll) Dwiker jl. Imar  Dwiker jl. Saadon	2015		INBUP INBUP INBUP  Dana Desa  Dana Desa

1	2	3	4	5
	Tambatan Perahu Rt 07(dll)			SILPA INBUP
3	Pembangunan Parkir ambulance  Gudang kantor Desa Sumur Bor dan tapak tangki(dll)	2016		SILPA DANA  DP DD
4	Pembuatan dwiker jl. Imar Pembuatan jaringan wifi Pembuatan parit beton kantor desa Pembangunan jembatan jl. Masuk gedung serbaguna(dll)	2017	1 unit	ADD ADD PBH  PBK
5	Pembangunan gedung serba guna pembangunan pagar kantor BPD pembuatan sumur Bor pembangunan WC 4 pintu(dll)	2018	1 unit  1 unit 5 unit 1 unit	ADD  ADD DDS DDS

Sumber : Kantor Desa Teluk Rhu 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan yang terletak di DesatelukRhusudahcukupbanyak, halinibisadilihatpadatabeldiatasseperti, Padatahunanggaran 2014 DesaTelukRhumembangunJembatanJalan Ismail, Rehabilitas Kantor MDA, Paritbeton Kantor Desa, PembuatanGudang, Kantor dan lain sebagainya, danjugaSumber Dana berasal daridana APBD.

PadaTahunanggaran 2015 DesaTelukRhumembangunSemenisasijalan Abu Naim dan Jalan Delima, Gorong-Gorong, Posyandu Samudra III dll yang berasal dari Dana INBUP, Pembangunan Dwi kerjalan Imar dan Juga Dwi kerjalan Sadoon berasal dari Dana Desa, Sedangkan Tambatan PerahuRt 07 dan lain sebagainya berasal dari Dana Silpa dan Inbup.

Pada Tahun anggaran 2016 Desa Teluk Rhu membangun Pembangunan Parkirdan ambulance berasal dari Dana Silpa, sedangkan Gudang Kantor Desa, Sumur Bor dan Tapak tangki berasal dari Dana Desadan Dana Pemerintah (Dp).

Pada Tahun anggaran 2017 Desa Teluk Rhu membangun Pembuatan Dwiker Jalan Imar, Pembuatan JaringanWifi, Pembuatan Paritbeton, Kantor Desa, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Jalan Mau ke Gedung serbaguna, dan lain sebagainya, yang berasal dari Dana ADD, PBH, Dan juga .PBK

Dan juga pada tahun 2018 Desa Teluk Rhu membangun Gedung Serbaguna, Pembangunan Pagar Kantor BPD, Pembuatan Sumur Bor dan juga Pembangunan WC 4 Pintu yang berasal dari dana ADD dan juga Dana DDS.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pembangunan yang ada Di Desa Teluk rhu sudah Cukup Banyak dan juga sudah cukup maksimal hanya saja bagaimana Kepala Desa dan juga masyarakat bias sama-sama bergotong royong untuk menjaga, merawat dan juga melestarikan Pembangunan-Pembangunan tersebut.

Desa teluk Rhu memiliki jumlah penduduk terhitung pada tahun 2018 berjumlah 2.377 jiwa dan luas wilayah 72,5 km<sup>2</sup>/ 7,250 ha, desa ini memiliki penduduk terbanyak dari desa-desa yang ada di kecamatan Rupal Utara dan memiliki luas wilayah terluas dari Desa lain. Namun secara umum kerja sama masyarakat Desa teluk Rhu dalam menjaga dan melestarikan lingkungan cenderung belum begitu baik, karena kurangnya fungsi kepemimpinan kepala Desa Teluk Rhu dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gotong royong masih terbilang sangat rendah.

Salah satu fungsi kepemimpinan adalah fungsi partisipasi dan pengendalian. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Keberhasilan kepala desa dalam membangun desanya dilihat dari bagaimana kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. Keikutsertaan kepala desa tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

Stoner (1996:165) mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah agar seseorang beroperasi secara efektif kelompok memerlukan seseorang untuk melakukan dua hal fungsi utama, yaitu : (1) Berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah, (2) Memelihara kelompok atau sosial, yaitu tindakan seperti menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa individu merasa dihargai oleh kelompok.

Fungsi kepemimpinan menurut Siagian (2003:48-70), yaitu: (1) pimpinan sebagai penentu arah, (2) pimpinan sebagai wakil dan juru bicara birokrasi, (3) pimpinan sebagai komunikator yang efektif, (4) pimpinan sebagai mediator, dan (5) pimpinan selaku integrator.

Fungsi kepemimpinan menurut nawawi (2006;9) adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama yaitu :

1. pemimpin sebagai penentu arah

dalam fungsi penentu arah yaitu :

- a. perumusan strategi
- b. pengambilan keputusan
- c. memberikan motivasi

2. pemimpin sebagai wakil dan juru bicara

dalam fungsi sebagai wakil dan juru bicara yaitu:

- a. membentuk suasana organisasi yang baik
- b. pemeliharaan hubungan didalam organisasi
- c. pemeliharaan hubungan diluar organisasi

3. pimpinan selaku komunikator

dalam fungsi pimpinan selaku komunikator yaitu :

- a. mampu menjelaskan
  - b. mampu mempengaruhi
  - c. mampu menyatukan
4. pemimpin selaku mediator

dalam fungsi selaku mediator yaitu ;

- a. pencegahan adanya konflik
- b. penyelesaian konflik
- c. pengadaan mediasi

5. pemimpin selaku integrator

dalam fungsi selaku integrator yaitu :



- a. mampu menyatukan persepsi
- b. mampu menghilangkan perbedaan
- c. adanya satu tindakan

Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, maka fungsi lain kepemimpinan birokrasi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi perintah
2. Fungsi konsultatif
3. Fungsi partisipatif
4. Fungsi delegasi.

Kepala desa memiliki fungsi penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan harus mampu merencanakan dan membuat suatu keputusan yang nanti dipergunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dalam membuat keputusan kepala desa juga harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari aparatur dan masyarakatnya, agar keputusan yang dibuat kepala desa dapat diterima bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa, khususnya badan permusyawaratan Desa, dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala

desa sehingga badan permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Badan permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan atau badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituang dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh badan permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan Desa, peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa merupakan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.

Kenyataan yang ditemui di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara kabupaten Bengkalis dimana masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dinilai belum efektif, dengan kata lain partisipasi masyarakat masih kurang. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan masyarakat menganggap bahwa pembangunan



adalah tanggungjawab pemerintah Desa semata. Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak akan bisa menjalankan pembangunan tanpa adanya partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa anggota badan permusyawaratan Desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat, Linmas, KPM,LKPM, tokoh masyarakat, dan karang taruna dapat dilihat masyarakat dalam kehadiran rapat musyawarah perencanaan pembangunan dapat dilihat ditabel berikut ini

**Tabel I.2 : Jumlah Daftar Hadir Dalam Rapat Musyawarah Pembangunan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis**

No	Utusan	Jumlah Yang Diundang (Tahun)			Jumlah Yang Hadir (Tahun)		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Aparat desa	12	12	12	12	12	12
2	BPD	9	9	9	2	3	2
3	LKMD	9	9	9	2	2	1
4	Kepala Dusun	3	3	3	3	3	3
5	Ketua RW	4	4	4	4	4	4
6	Ketua RT	9	9	9	9	9	9
7	Linmas	7	7	7	4	2	2
8	Tokoh masyarakat	6	6	6	1	2	1
9	Karang taruna	9	9	9	2	2	2
	Jumlah	68	68	68	39	38	36

Sumber : kantor kepala Desa Teluk Rhu Tahun 2018

Dari tabel I.2 diatas menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dalam memenuhi undangan rapat musrembang Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara kabupaten bengkalis terlihat pada pengurus BPD dari 9 orang yang diundang hanya 2 orang yang hadir pada tahun 2012, 3 orang yang hadir ditahun 2013 dan 2 orang ditahun 2014, begitu juga terlihat pada LKMD dari 9 orang yang diundang hanya 2 yang hadir ditahun 2012 dan meningkat ditahun 2013 yaitu 3 orang , namun mulai turun lagi ditahun 2014 yaitu 2 orang, sedangkan Linmas yang diundang 7 orang ditiap tahun namun yang hadir cukup banyak hanya ditahun

2012 yaitu 4 orang dan ditahun berikutnya hanya 2 orang yang hadir, dan dari tokoh masyarakat yang diundang pada tahun 2012 dan 2013 sebanyak 6 orang namun yang hadir hanya 1 orang pada tahun 2012 , 2 orang ditahun 2013 dan menurun lagi ditahun 2014 yaitu 1 orang. begitu juga pada karang taruna yang diundang tiap tahunnya 9 orang dan yang hadir tiap tahunnya hanyalah 2 orang tidak pernah meningkat. ini yang menjadi perbincangan dan pembicaraan yang mana tokoh masyarakat kurang kesadaran dalam mengikuti kegiatan bergotong royong dalam kebijakan pembangunan yang ingin dilaksanakan pemerintah Desa Teluk Rhu kecamatan Rupert Utara.

Di desa teluk rhu masih juga terdapat konflik antar masyarakat seperti terjadinya perkelahian, perselisihan dan sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan bertanggungjawab seharusnya mampu menyelesaikan konflik yang terjadi namun, berdasarkan observasi yang ditemui dilapangan kepala desa belum mampu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa dan penjelasan peraturan Bupati Bengkalis tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengatakan ADD diberikan kepada Desa untuk diperlukan :

- A. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% dari alokasi Dana Desa yang diterima dapat dipergunakan untuk :
  1. Mebiyai sarana dan prasarana fasilitas umum dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pemberdayaan sosial masyarakat,

termasuk didalamnya pelaksana kegiatan serta upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik, belanja barang dan jasa untuk kegiatan fisik, dan belanja pemeliharaan, fasilitas umum;

2. Membiayai sarana dan prasarana, fasilitas umum, harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran belanja (RAB) yang dibuat oleh konsultan perencana dan atau pendamping desa bagian pembangunan dan atau asisten kecamatan yang disahkan oleh koordinator kecamatan, PPTK, dan kepala Desa sebagai PA, dokumen tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan fisik sebagai sarana perencanaan dan pengendalian;
3. Pembangunan fisik yang bersifat multi years, artinya suatu kegiatan karena volume dan pembiayaannya besar harus dilakukan lebih dari satu tahun anggaran;
4. Pemberdayaan lembaga masyarakat desa yaitu, berupa operasional dan bantuan kepada:
  - a. RT disesuaikan dengan jumlah warga yang diayominya,
  - b. RW disesuaikan dengan luas dan banyaknya RT yang dibina,
  - c. LKMD atau LMPD atau sebutan lainnya
  - d. PKK Desa
  - e. Karang Taruna
  - f. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Desa (FKPM)
  - g. Lembaga Adat Melayau (LAMR) Desa
  - h. PAUD dan sejenisnya

- 
- i. Perpustakaan Desa
  - j. Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
  - k. Perlindungan masyarakat (LINMAS)
  - l. Petugas pencatat nikah (P2N) atau sebutan Lainnya  
Imam masjid dan mushalla
  - m. Guru ngaji
  - n. Petugas rumah ibadah
  - o. Sanggar atau kelompok seni budaya
  - p. Operasional rumah ibadah
5. peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktivitas posyandu, polis Desa, Pos lansia dan lain-lain. bantuan pemberdayaan masyarakat tersebut berupa dan operasional dan pengadaan peralatan seperti timbangan untuk bayi dan balita, tempat tidur dan kasur periksa, meja dan kursi pendaftaran, pengadaan permainan anak-anak dan bantuan kepada kader posyandu berupa honor bulanan
  6. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja dan bantuan sosial kepada pendidikan anak usia dini. Alokasi dana desa PAUD diperoleh dari belanja bantuan sosial
  7. Pembinaan terhadap anak terlantar dan anak yatim dilakukan terhadap mereka yang masih berstatus pelajar mulai dari TK atau PAUD hingga SLTA atau sederajat melalui bantuan kegiatan pendidikan seperti pembelian buku, sepatu, baju dan keperluan sekolah lainnya. Alokasi

dan diperoleh dari belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kebutuhannya

8. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama, sosial budaya dan adat istiadat seperti kegiatan pemuda dan olahraga, pembinaan LPTQ, kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional serta bantuan kegiatan MTQ Desa disesuaikan dengan kegiatannya.
9. Keadaan darurat adalah suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak fungsinya pelayanan umum seperti jembatan roboh, kebakaran rumah penduduk dll.
10. Bencana alam adalah suatu kondisi tertentu yang menyebabkan tidak berfungsinya pelayanan umum akibat bencana alam, seperti banjir, angin ribut, longsor dll.
11. Pengembangan teknologi tepat guna (TTG)
12. Kegiatan lainnya yang termasuk kedalam aktivitas pemberdayaan kepada masyarakat yang terlebih dahulu telah dikonsultasikan yang disetujui oleh tim Kecamatan dan tim Kabupaten.

**Tabel I.3 : Jenis Dan Sumber Dana Pembangunan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis**

Tahun	Jenis Kegiatan	Target (Rp)	Sumber Pembangunan	
			Add	Swadaya Masyarakat
2012	Sarana Olahraga	10.000.000	8.000.000	2.000.000
	Jembatan Jalan	95.000.000	90.000.000	5.000.000
2015	Rehabilitas 3 Mesjid Desa Teluk Rhu	60.000.000	45.000.000	15.000.000

1	2	3	4	5
	Rehabilitasi Pasar Teluk Rhu	20.000.000	5.000.000	3.000.000
	Pembuatan Gedung Kantor Desa Teluk Rhu	38.070.000	20.000.000	5.000.000

Sumber : Kantor Desa Teluk Rhu Tahun 2018

Dari tabel I.2 di atas dapat kita lihat bahwa dana ADD pembangunan di desa teluk Rhu menunjukkan swadaya masyarakat yang masih begitu rendah hal ini menunjukkan jarak antara target pembangunan dan swadaya masyarakat desa sangat berbeda jauh.

Pada tahun tabel di atas pada tahun 2012 dari sarana dan prasarana olahraga dan jembatan jalan, dan pada tahun 2015 dari rehabilitasi 3 mesjid desa teluk rhu, rehabilitasi pasar desa teluk rhu dapat dilihat jarak antara target, swadaya dan persennya masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan ini terlihat pada tahun 2015 pada rehabilitasi pasar desa Teluk Rhu dan pembuatan gedung kantor Desa.

Pada penelitian ini penulis ingin melihat peranan dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis yang mana desa Teluk Rhu ini merupakan desa yang tergolong memiliki kependudukan yang banyak dari desa desa lainnya, dan memiliki luas wilayah yang terluas, dan dalam sistem pembangunan yang tergolong baik dan lancar. dan diharapkan dapat menjadi desa percontohan bagi desa-desa lainnya.

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan pengamatan peneliti maka dapat diperoleh masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Masih terkesan belum optimalnya fungsidari kepala desa dalam penyampaian informasi mengenai penyadaran masyarakat dalam melestraikan dan juga merawat bangunan-bangunan yang telah dibangun di desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.
- 2) Terlihat masih kurangnya peran dan fungsi kepala desa dalam pemeliharaan hubungan didalam organisasi seperti kurang diadakannya rapat bersama organisasi-organisasi lain yang mengakibatkan masyarakat setempat lebih mementingkan urusan mereka masing-masing.
- 3) Masih terkesan belum optimalnya peran kepala desa selaku dalam penyelesaian konflik baik dalam organisasi maupun dikalangan masyarakat
- 4) Masih belum optimalnya fungsi kepemimpinan kepala desa Teluk Rhu yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk ikut bergotong royong dalam pembersihan lingkungan.

Dari fenomena-fenomena diatas, sekalipun bukan gambaran secara umum namun, dapat dilihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa masih belum optimal ini dikarenakan fungsi kepemimpinan kepala desa mengenai pemberdayaan masyarakat belum berjalan semaksimal mungkin. Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan diatas maka ditetapkan judul penelitian ini yaitu **“Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis”**.

## B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu bahwa kepala desa selalu memimpin di desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun bukan hanya masyarakat saja yang diberdayakan tetapi aparatur pemerintah di desa Teluk Rhu juga harus diberdayakan agar apapun yang direncanakan bisa bersama-sama direalisasikan oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu peneliti merumuskan suatu permasalahan yaitu : **“Bagaimana Fungsi Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten bengkalis”**.

## C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Fungsi kepemimpinan kepala Desa Teluk Rhu kecamatan Rupert Utara kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Fungsi Fungsi kepemimpinan kepala Desa Teluk Rhu kecamatan Rupert Utara kabupaten Bengkalis.

### 2. Kegunaan penelitian



- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan Administrasi Desa antara teori yang praktik yang sesungguhnya
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkn dapat mengembangkan pengetahuan mahasiswa khususnya tentang administrasi desa terhadap Fungsi Kepemimpinan Kepla Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa saran atau pemikiran bagi Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus menjadi landasan teori dalam

penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya usulan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca menginginkan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

### 1. Konsep administrasi

Menurut Lonard d. White ( dalam Syafiie 2003 : 4) administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil dan sebagainya.

Menurut prajudi Atmosudirjo (dalam syafiie 2003:4) administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Menurut The Liang Gie ( dalam zulkifli 2005:4) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerja pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hadari Nawawi ( dalam Zulkifli 2005:5) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam buku petunjuk Administrasi Terbitan Universitas Gajah Mada (dalam Zulkifli 2003 :6) administrasi disebut sebagai berikut :

1. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula
2. Suatu proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha pemerintah maupun usaha swasta, baik usaha sipil maupun usaha militer, baik usaha berskala besar maupun usaha kecil-kecilan
3. Suatu pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus
4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama selompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu disiplin ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri.

*Pertama*, sebagai disiplin ilmu, Administrasi memiliki objek material yaitu manusia, artinya melihat dari pokok masalah yang dibahas maka manusialah sosok yang dibahas. Namun demikian, yang namanya objek material sudah barang tentu akan bertumpang tindih (convergency) dengan objek materi ilmu lain yang sama-sama membahas manusia sebagai sosok yang dikaji, yaitu seperti ilmu jiwa, ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu ekonomi dan lain-lainnya.

*Kedua*, administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek formal, dalam arti sudut pandangnya adalah penyelenggaraan. Baik

penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut. Dalam rangkaian penyelenggaraan inilah telah ditetapkan bersama sejak semula.

*Ketiga*, sebagai ilmu, administrasi diterima secara universal diseluruh dunia. Walaupun kemudian dilihat dari acara berpikir (paradigma) terdapat berbagai kutub yang saling bertolak belakang.

*Keempat*, sebagai ilmu, administrasi juga dapat dipelajari dan diajukkan, sehingga sebagai perguruan tinggi mendirikan jurusan dan kajian administrasi pada berbagai strata. Bahkan pada beberapa perguruan tinggi didirikan sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) sebelum menjadi mahasiswa.

*Kelima*, ilmu administrasi juga mempunyai sistematika yang khas, bahkan sistem administrasi suatu negara tidak sama dengan sistem administrasi yang berubah sesuai ruang dan waktu.

Selanjutnya, administrasi juga harus dipandang sebagai moral dan etika. Karena pemerintah harus mengajak kebenaran dan kebaikan, serta melarang terjadinya dekadensi moral dalam lingkungan masyarakat yang dipimpinnya. Khususnya untuk mengantisipasi keburukan dekadensi moral maka memang hanya pemerintah yang mampu melaksanakan. Karena yang bersangkutan memiliki seperangkat kekuasaan militer, polisi, dan jaksa yang beradda dibawah kekuasaan aparat eksekutif.

Tetapi apabila pemerintah sendiri tidak memiliki hati nurani dan etika moral yang sudah berkurang tentu yang bersangkutan akan mendiamkan

terjadinya berbagai tindak kejahatan, kriminak, serta dekadensi moral lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu negara ketika pemerintah mendiamkan kejahatan tersebut.

Yang harus dilindungi dan dilayani pemerintah adalah kebaikan dan kebenaran seperti orang tua terlantar, anak yatiim piatu, dan para kaum fakir miskin. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan berbagai dinas sosial ditingkat daerah dan departemen sosial ditingkat pusat berbagai usaha untuk menanggulangi biaya hidup mereka.

## 2. Konsep Organisasi

Menurut Sondang P.Siagian ( dalam Kartono 2006:7) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau kelompok yang disebut bawahan.

Menurut Drs.Soekarno. K ( dalam Hasibuan 2014 :120) organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian dinamis) adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu mengadakan pembagian kerja.

Menurut Koontz & O'Donnel ( dalam Hasibuan 2014 : 120 ) organisasi adalah hubungan wewenang dan dimaksud untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal maupun horizontal diantara posisi-posisi yang telah

diserahi tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perubahan, jadi organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat dan menyatukan perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha, dikoordinasi.

Menurut Philip Senznick (dalam Hasibuan 2014: 121 ) organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan dengan tekanan internal dan eksternal dan selalu dalam proses evolusi yang kontiniu.

Menurut Prof, Dr. Mr. S. Pradjudi Atmosudirjo (dalam Hasibuan 2014:121) organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama antara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut March and Simon ( dalam Hasibuan 2014:121) organisasi adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari unsur psikologis, sosiologis, teknologis, dan ekonomis yang dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif.

Menurut James D.Mooney ( dalam Syafiie 2003:113) organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Jhon D. Millet ( dalam Syafiie 2003:113) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana perjalanan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan sesuatu tujuan bersama.

Menurut Drs. H. Melayu S.P.Hasibuan (dalam Hasibuan 2014:122) unsur-unsur organisasi yaitu :

1. Manusia (Human Factor), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerjasama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan)
2. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya
3. Tujuan artinya, organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai
4. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan
5. Struktur, artinya organisasi itu baru ada jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya
6. Teknologi, artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur teknis
7. Lingkungan( *environment external social system*).

### **3. Konsep manajemen**

Lahirnya konsep Manajemen ditengah gejolak masyarakat sebagai konsekuensi akibat tidak seimbangnya pengembangan teknis dengan kemampuan sosial. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, administrasi dan sebagainya. Sebagai perbandingan studi lebih lanjut berikut pengertian manajemen menurut para ahli.

Menurut Jhon D.Millet (dalam siswanto 2013:1) membatasi manajemen sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasika dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Menurut Millet lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain berurutan.

- a. Proses pengarahan, yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seseorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok/formal dan untuk pencapaian tujuan
- b. Proses pemberian fasilitas, yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang terorganisasi dalam kelompok formal dalam pencapaian tujuan.

Menurut James A.F Stroner dan Charles Wankel ( dalam isswanto 2013:2) memberikan batasan manajemen, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Paul Hersay dan Kenneth H. Blancard( dalam siswanto 2013 :2) memberi batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakaukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.



Manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya yaitu ilmu ekonomi, statistik, akuntansi dan sebagainya.

Menurut Drs. Melayu S.P Hasibuan (dalam Hasibuan 2014:2) manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Terry (dalam Hasibuan 2014:2) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Stonner (dalam Siswanto 2015:2) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Focus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan Locusnya adalah berbagai bentuk dari jenis organisasinya. Kedua prapta ini sama-sama memandang manusia sebagai sumberdaya strategis setiap organisasi. Oleh karena itu, penelaahan terhadap setiap fungsi manajemen umumnya tertuju kepada peranan sumberdaya manusia sebagai pengguna dan pengelola daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi.

Menurut Andrew F. Sikula (dalam hasibuan 2014:2) manajemen pada umum dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasia, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Akumulasi tugas yang dijadikan fungsi suatu jabatan, tentu tidak sama antara satu dengan jabatan lainnya. Hal ini selalu dikaitkan dengan spesifikasi uraian tugas masing-masing departemen atau unit-unit organisasi. Secara teritis, untuk melaksanakan uraian tugas itu secara efektif dan efisien, kepada seorang manajer tertentu disyaratkan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang spesifik pula. Disamping itu kepada seorang administrator juga disyaratkan dan mengarahkan seluruh sumberdaya yang dimiliki atau dibawah kuasa pengelola organisasi.

Pengetahuan dan keterampilan tersebut adalah manajemen baik secara seni maupun pengetahuan. Argumentasi teoriti tentang esensialnya memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen bagi kalangan administrator pemimpin, manajer atau sebutan lainnya yang sering dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya.

#### **4. Konsep Pemimpin**

Pemimpin/leader macam-macam pengertian dari para ahli. Berikut ini beberapa defenisi tentang defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya;

Menurut Hasibuan (2011:157), pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai tujuan.

Menurut kartono (2010:18), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Menurut Henry pratt pairchild (dalam kartono 2010:23), pemimpin adalah seorang yang memimpn dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui kekuasaan dan posisi.

Sebagaimana diungkapkan sedermayanti (2009:119) bahwa pemimpi (leader) adalah :

- a. Seseorang yang mampumemengauhi orang laian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan
- b. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan sedangkan pimpinan (manager) adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama harus menjalankan dua hal secara efektif. Manajemen dan kepemimpinan
- c. Orang yang melakukan atau menjalankn kepemimpinan
- d. Kata “pemimpin” mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hirarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan,

karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal, dan tanggung jawab.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

### 5. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan yang bermakna menjadi penting sebab ia membuat suatu perbedaan ini muncul dalam kehidupan para pengikut di dalam suatu kelompok organisasi. Terdapat juga perbedaan dalam kinerja kelompok atau organisasi, dan ada pula suatu perbedaannya yang penting dalam organisasi itu sendiri sebagai hasil dari kepemimpinan yang penting dan bermakna.

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi, tanpa kepemimpinan dan bimbingan maka antara tujuan dan perseorangan tujuan organisasi bisa menjadi renggang.

Menurut Joseph C. Rost, dalam buku Triantoro Safria ( 2014: 3 ) Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut ( bawahan ) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama.

Menurut Kartono Kartini, dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan (2010:18) pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan

kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Dengan demikian kepemimpinan memiliki beberapa implikasi. Pertama, kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau para pengikut, kedua, kepemimpinan melibatkan suatu distribusi kekuasaan yang tidak sama antara para pemimpin dengan para anggota kelompoknya, ketiga, kepemimpinan memiliki kemampuan untuk memakai bentuk-bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku para anggota organisasinya dalam berbagai cara, keempat, kepemimpinan harus memiliki kompetensi ( knowledge, skili, abilities dan experiences ) yang cukup, integritas moral dan etika pribadi yang tinggi untuk memimpin dan menjadi suri tauladan bagi para pengikut dalam membangun organisasi.

Seseorang pemimpin tugas pokoknya adalah mengantarkan, mengetahui, memelopori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing dan lain sebagainya yang sebaiki-baiknya untuk memperoleh hasil atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam memenuhi tugas tersebut maka seorang pemimpin mempunyai beberapa fungsi yang harus ia laksanakan.

Menurut Sinambela ( 2006:101 ) mengatakan arti dari kepemimpinan, menurut beliau dalam bukunya:

Pimpinan artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan suatu agar kegiatannya tersebut dapat

terselenggaran dengan efesiensi. Memimpin adalah kemampuan seseorang untuk mengilham bawahan agar dapat bekerja guna mencapai tujuan organisasi. Secara umum kepemimpinan adalah suatu kewenangan yang di sertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang-orang yang berada di bawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi.

Menurut Sedermayanti (2009:130), mengatakan Fungsi merupakan gejala sosial, karna harus mewujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok/ organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi :

- a. Dimensi berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan/ aktivitas pemimpin.
- b. Dimensi berkenaan dengan tingkat dukungan / keterlibatan orang yang di pimpin dalam melaksanakan tugas pokok kelompok/ organisasi.

Menurut Stogdill dalam buku Kartini Kartono (2010:157) mengatakan kepemimpinan atau leadership adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisasi dalam usaha-usaha menentukan tujuan dan mencapainya.

Adapun fungsi kepemimpinan menurut Koonz dalam Kartono (2002:93) adalah mengajak atau menghimbau semua bawahan atau pengikut, agar dengan penuh kemauan untuk memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kemampuan secara maksimal.

Menurut Sondang P. Siagian, M.P.A (2010:129) menemukan beberapa gaya kepemimpinan antara lain:

- a. Kompleksitas tugas yang harus diselenggarakan
- b. Jenis pekerjaan, misalnya apakah bersifat rutin atau inovatif
- c. Bentuk dan sifat teknologi yang digunakan
- d. Persepsi, sikap dan gaya yang digunakan oleh para pejabat pimpinan yang menduduki hirarki jabatan yang lebih tinggi
- e. Norma-norma yang dianut oleh kelompok kerja yang berada dibawah pimpinan yang bersangkutan
- f. Tentang kendali yang paling tepat untuk diterapkan
- g. Ancaman yang datang dari luar organisasi yang mesti dihadapi, misalnya dalam bentuk persaingan bagi suatu organisasi niaga
- h. Tingkat stress yang mungkin timbul sebagai akibat beban tugas, tingkat tanggung jawab, desakan waktu dan faktor-faktor lainnya yang dapat menimbulkan ketengangan
- i. Iklim yang terdapat dalam organisasi

Menurut Dyah dan Arif (2014:129) Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang yang dipengaruhi bertindak seperti yang dikehendaki pemimpin.

Pemimpin (leader) adalah seorang individu yang terdapat dalam sebuah kelompok atau organisasi yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap individu yang lain menurut Greenberg dalam Nuraini (2004:69)

Fungsi kepemimpinan menurut Nawawi (2006:9) adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama yaitu :

6. Pemimpin sebagai penentu arah yaitu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam fungsi penentu arah yaitu :
  - d. Perumusan strategi
  - e. Pengambilan keputusan
  - f. Memberikan motivasi
7. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara yaitu pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh bawahan, Dalam fungsi sebagai wakil dan juru bicara yaitu:
  - d. Membentuk suasana organisasi yang baik
  - e. Pemeliharaan hubungan didalam organisasi
  - f. Pemeliharaan hubungan diluar organisasi
8. Pimpinan selaku komunikatoryaitumenyampaikansuatukeputusandalamrangkapengendalian pengawasansertamenyampaikaninformasikepadapihak lain, Dalam fungsi pimpinan selaku komunikator yaitu :



- d. Mampu menjelaskan
  - e. Mampu mempengaruhi
  - f. Mampu menyatukan
9. Pemimpin selaku mediator yaitu fokus sebagai penyelesaian situasi konflik yang mungkin tumbuh dalam organisasi, Dalam fungsi selaku mediator yaitu ;
- d. Pencegahan adanya konflik
  - e. Penyelesaian konflik
  - f. Pengadaan mediasi
10. Pemimpin selaku integrator yaitu adanya pembagian tugas dan diperlukan spesialis, oleh karena itu diperlukan integritas terutama pada pihak akhirarki, hanya pimpinanlah yang beradadiatas, Dalam fungsi selaku integrator yaitu :
- d. Mampu menyatukan persepsi
  - e. Mampu menghilangkan perbedaan
  - f. Adanya satu tindakan

Menurut Adair dalam Pasalong (2010:22-23) Fungsi Kepemimpinan yaitu:

1. Perencanaan
2. Pemrakkarsaan
3. Pengendalian
4. Pendukung
5. Penginformasi
6. Pengevaluasian

Menurut Lako (2004:80) Kepemimpinan (*leadership*) memiliki makna yang luas, yaitu:

1. Sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas para anggota kelompok.
2. Memberikan visi, rasa gembira, kegairahan, cinta kepercayaan, semangat, obsesi, dan konsisten kepada para anggota organisasi.
3. Menggunakan symbol-simbol, memberikan perhatian, menunjukkan contoh atau tindakan nyata, menghasilkan para pahlawan pada semua level organisasi, dan memberikan pelatihan secara efektif kepada anggota organisasi dan masih banyak.

Menurut Sedarmayanti juga mengatakan lima pokok kepemimpinan yaitu:

- a. Fungsi intruksi
- b. Fungsi Konsultasi
- c. Fungsi Partisipasi
- d. Fungsi Delegasi
- e. Fungsi Pengendalian

Menurut Sedarmayanti (2009:153) pendekatan tingkat laku pada kepemimpinan artinya perbuatan, kelakuan, atau perangai, dalam pendekatan tingkah laku, dimensi kepemimpinan efektif, terdiri dari dua aspek utama:

1. Aspek Fungsi Kepemimpinan
  - a. Fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah.
  - b. Fungsi pemeliharaan kelompok/sosial.

Pemberian sasaran penyelesaian, informasi dan pendapat.

Fungsi pemeliharaan kelompok/sosial, segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar menegahi perselisihan perbedaan pendapat, persetujuan dengan kelompok lain dan memastikan individu merasa di hargai kelompok.

Fungsi yang harus di selenggaraakan pimpinan:

- a. Memberitahui kebijakan pimpinan organisasi kepada staf pembantu dan merumuskan menjadi pekerjaan staf termasuk implikasi.
- b. Memimpin mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan staf serta membantu anggota staf yang kesukaran dalam masalah yang dihadapi salam pemecahan dan penyelesaian masalah.
- c. Mengadakan pegecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan staf.
- d. Mengadakan integrasi pekerjaan staf.
- e. Memberi keterangan/penjelasan kepada pimpinan tentang perkembangan tugas staf.
- f. Menerima petunjuk dan keputusan dari pimpinan untuk diolah sebagai tugas staf.
- g. Mengambil langkah yang di perlukan agar keputusan pimpinan dapat terlaksanakan dengan efektif.
- h. Mengumpulkan lapporan tentang pelaksanaan dari ini.
- i. Menggerakan staf untuk mempelajari keadaan dan kemungkinan untuk perencanaan inovatif.

## 2. Aspek gaya kepemimpinan

Pemimpin akan berhasil memimpin secara efektif bila:

- a. Mempunyai kecerdasan tinggi untuk memikirkan dan mencari pemecahan persoalan
- b. Mempunyai emosi stabil
- c. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu mamhuat bawahan betah, senang, dan puas dengan dalam pekaerjaan
- d. Mempunyai keahlian mengorganisasi dan menggerakan bawahan secara kebijaksana.
- e. Mempunyai ketrampilan manajemen untuk menghadapi persoalan masyarakat.

## 6. Konsep Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan element utama organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi, dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lainnya. Manusia yang memilih teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memeliharanya, disamping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan yang lainnya oleh karena itu pengelolaan sumber daya dalam organisasi menjadi suatu hal sangat penting. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengelola, mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya.

Manajemen hanyalah merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan dari pada penguasaan, karyawan dan juga masyarakat, menurut hasibuan (1995;7) yang mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen antara lain :

a. *Man*

Man dalam organisasi publik diartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak ada proses kerja

b. *Money*

Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).

c. *Materials (bahan-bahan/perlengkapan)*

Manajemen ada karna adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.

d. *Machines (alat-alat)*

Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberi keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.

e. *Method (cara0cara kerja)*

Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik dan mempelancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.

f. *Market*

Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.

Dalam perkembangan unsur man (manusia) telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia. manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen tersebut yaitu man (manusia). tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai

tujuan organisasi, maka untuk ini sangat diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Menurut hasibuan (1995;11) yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu dan juga seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan juga masyarakat.

Sedangkan nawawi (2008;41) yang menyebutkan bahwa ada tiga pengertian sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan),
2. sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan aset dan fungsi sebagai modal (non material dan non finansial) didalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi sebuah organisasi.

## **7. Konsep Undang-Undang Desa Dan Peraturan Pemerintah Tentang Desa**

Dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 desa, yang dimaksud dengan desa pada pasal 1 ayat 1 adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain.

Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia. (dalam undang-undnag nomor 06 tahun 2014).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 menyatakan pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam hal ini personal yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat di desa Teluk Rhu yaitu Kepala Desa, hal ini sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 06 tahun 2014 tentang desa pasal 26 yang berbunyi :

1. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b. Menyajikan rancangan peraturan Desa
  - c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBdes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
  - f. Membina perekonomian desa
  - g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
  - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) berbunyi :

Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam ayat 2 yaitu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan daerah;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undnag Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3 berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan



- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selanjutnya lagi pada UU Desa 2014 pasal 4 berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Kemudian dalam pasal 27 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

- c. Memberi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran, dan;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut pada pasal UU Desa 2014 pasal 28 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 4 dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam UU Desa tahun 2014 pasal 29, dinyatakan kepada Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan Desa, anggota Dewan perwakilan Rakyat republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Meninggalkan tugas selama 30( tiga puluh ) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam UU Nomor 06 tahun 2014 pasal 30 yang berbunyi :

1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

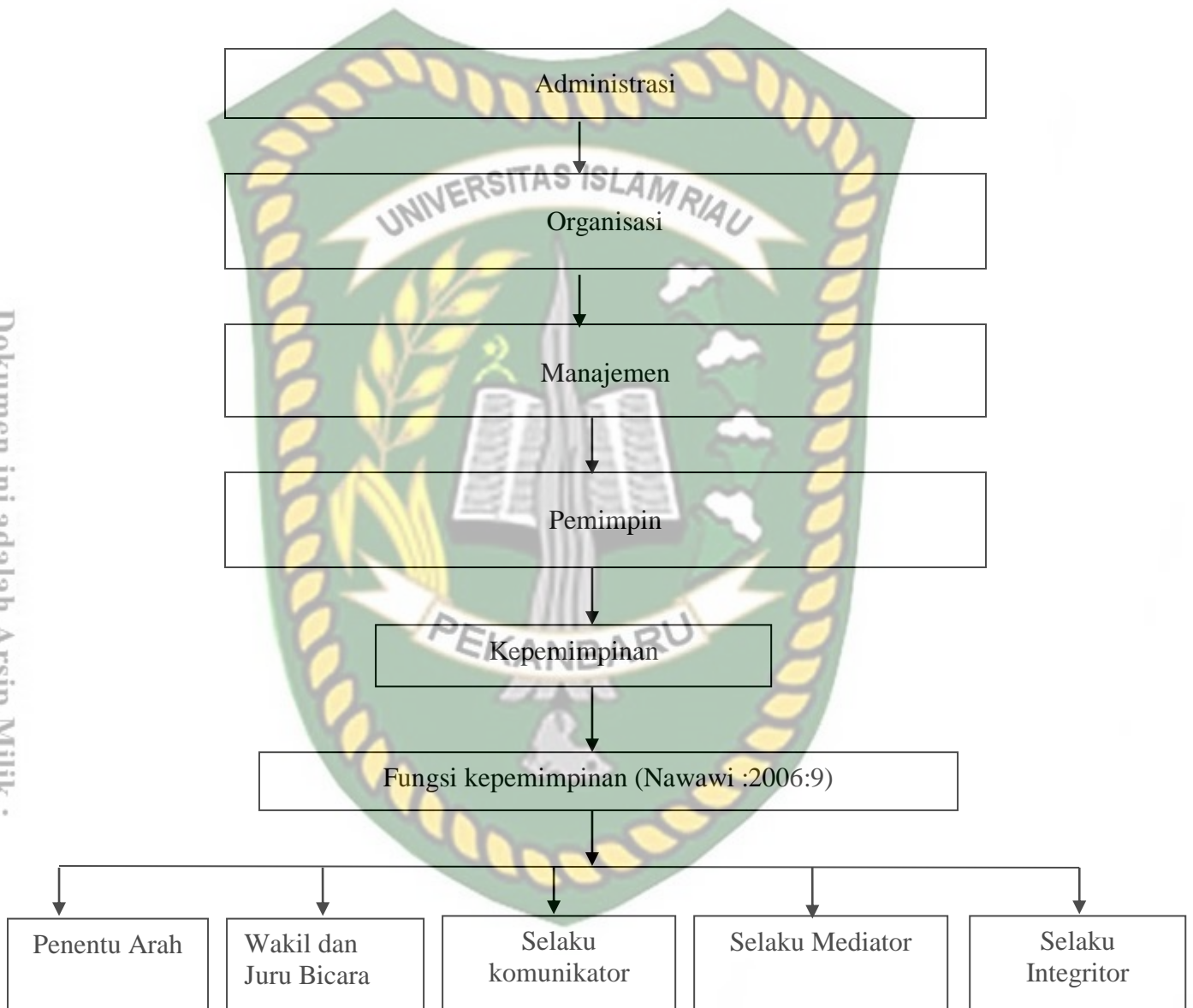
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## **B. Kerangka Pikir**

Administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Slamet menyatakan pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta mengindari pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat, ( dalam totok,2012;100).

**Gambar II.I : Kerangka Pikir Analisa Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa  
Teluk Rhu Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

*Sumber : modifikasi peneliti tahun 2018*

### C. Hipotesis

Hypothesis adalah jawaban sementara terhadap Rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Diduga masih kurang tanggapnya Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu kecamatan Rupa Utara kabupaten Bengkalis.

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau konsep terkait penelitian ini maka, peneliti memberikan beberapa konsep administrasi dalam arti sempit adalah sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretarian yang terkait dengan surat menyurat ( korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya :

- a. Administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya
- b. Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara
- c. Organisasi adalah wadah untuk memfalisitasi proses kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- d. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- e. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi

- f. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi, tanpa kepemimpinan atau bimbingan maka antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi menjadi renggang (lemah).
- g. Manajemen sumber daya manusia proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.
- h. Pemimpin sebagai penentu arah adalah pemimpin sebagai pembuat kebijakan, program maupun strategi organisasi sebagai salah satu cara mencapai tujuan organisasi
- i. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara birokrasi, yaitu pemimpin sebagai pemelihara hubungan antara organisasinya dengan organisasi yang lainnya sebagai pendukung tugas dan fungsinya.
- j. Pemimpin selaku komunikator adalah pemimpin ialah orang yang dalam memberikan perintah menggunakan komunikasi langsung maupun tidak langsung kepada bawahannya
- k. Pemimpin selaku mediator adalah dalam pemimpin sebagai penengah apabila terjadi permasalahan atau konflik dalam organisasinya
- l. Pemimpin selaku integrator adalah proses pemersatu tujuan dengan menggunakan interaksi yang berkesinambungan agar tidak terjadi tumpang tindih antara bagian satu dengan bagian lainnya

m. Desa Teluk Rhu Yang di maksud dengan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara adalah Desa yang berada di Kecamatan rukat Utara Kabupaten Bengkalis Dengan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupataen Bengkalis nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2001 Nomor 08).

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.1 : Analisis Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis**

Konsep	Variabel	indikator	Item penelitian	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
Kepemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama (nawawi 2006:9)	AnalisisPelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis	1. Pemimpin sebagai penentu arah	a. Perumusan strategi b. Pengambilan keputusan c. Memberi motivasi	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara	a. Membentuk suasana organisasi yang baik b. Pemeliharaan hubungan didalam organisasi c. Pemeliharaan hubungan diluar organisasi	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		3. Pemimpin sebagai komunikator	a. Mampu menjelaskan b. Mampu mempengaruhi Mampu menyatukan	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		4. Pemimpin selaku mediator	a. Mencegah adanya konflik b. Penyelesaian konflik	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang

1	2	3	4	5
		5. Pemimpin selaku integrator	c. Pengadaan mediasi a. Mampu menyatukan persepsi b. Mampu menghilangkan perbedaan c. Adanya satu tindakan	terlaksana  Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Sumber : Modifikasi penulis ,2018

#### F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menentukan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator, yaitu: Terlaksana Dengan Skor 3, Cukup Terlaksana Dengan Skor 2, Kurang Terlaksana Dengan Skor 1.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Terlaksana** : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

**Cukup terlaksana** : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%



Kurang terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 1%-33%

Sementara itu ukuran setiap indikator ditetapkan sebagai berikut :

### 1. Penentu arah

Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 1%-33%

### 2. Sebagai wakil dan juru bicara

Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh

jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 1%-33%

### 3. Selaku komunikator

Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari



seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 1%-33%

#### 4. Selaku mediator

**Terlaksana** :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

**Cukup Terlaksana** :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%

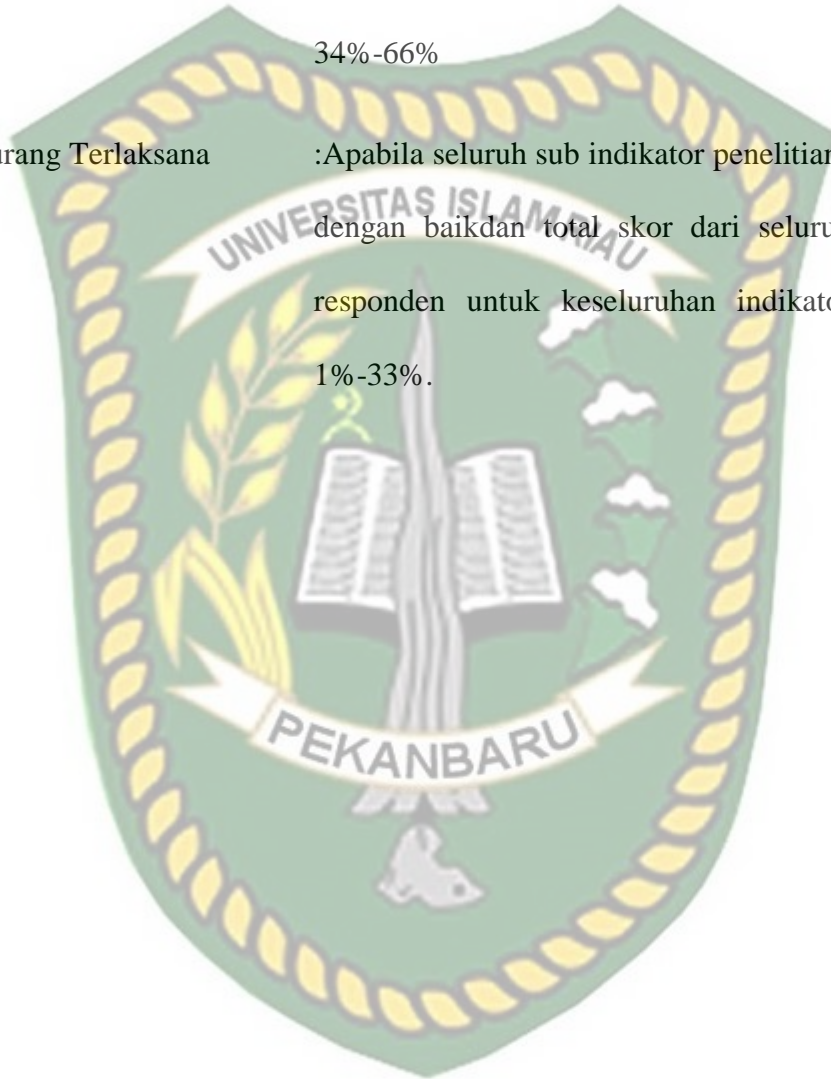
**Kurang Terlaksana** :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 1%-33%

#### 5. Selaku integrator

**Terlaksana** :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 1%-33%.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2012 : 16) proses penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat linear, dimana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data dan membuat kesimpulan dan saran. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Teluk Rhu karena peneliti menemukan permasalahan-permasalahan dan kejanggalan seperti kurangnya fungsi kepemimpinan kepala desa di Desa Teluk kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis serta data-data yang didapat juga lebih mudah karena masih dalam ruang wilayah peneliti, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

## **C. Populasi Dan Sampel**

Menurut sugiyono ( 2010: 90 ) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Ada pun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris, bendahara, staf desa, kaur desa, pengurusan BPD, pengurusan LPMD, Ketua Rw, Ketua Rt, serta kepala keluarga yang ada di 3 dusun, serta masyarakat.

Menurut soehartono (2008:57) sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Untuk lebih jelas keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1  
 Keadaan Populasi Dan Sampel Penelitian Pada Kantor Kepala Desa Teluk  
 Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis

No	Populasi	Populasi ( kK )	Sampel	Presentase
1	Lembaga perangkat Desa			
	1. Kepala Desa	1	1	100%
	2. Sekretaris Desa	1	1	100%
	3. Staf Desa	4	4	100%
	Lembaga Pemerintah Desa			
	4. Kepala urusan	3	3	100%
	5. Pengurusan BPD	9	9	100%
6. Pengurus LKMD	9	9	100%	
Jumlah		27	27	100%
2	Masyarakat atau KK			
	1. Dusun 1	114	11	10%
	2. Dusun 2	260	26	10%
	3. Dusun 3	200	20	10%
Jumlah		574	57	100

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Tahun 2018*

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk lembaga perangkat desa dan lembaga pemerintahan desa, dilakukan teknik sensus dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti atau yang disebut sebagai teknik sensus sampling adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, karna jumlahnya sedikit (Menurut sugiono, 2003:96).
2. Untuk masyarakat dan KK yang terbagi kepada dusun 1, dusun 2 dan dusun 3 penulis menggunakan teknik area sampling (cluster sampling). Menurut pasolong (2012:106) teknik area sampling (cluster sampling)

adalah teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah atau kelompok-kelompok yang ada . Maka penulis mengambil aparaturnya pada kantor desa Teluk Rhu mengambil setiap 2 orang selama 22 hari berkerja karena dianggap mewakili jumlah kartu keluarga tiap dusun.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Menurut Surwadi (2012:147) data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sipeneliti langsung dari objek yang diteliti. Adapun data yang diperlukan meliputi: data tentang fungsi kepemimpinan pada kantor kepala desa Teluk Rhu:

- a. Sosialisasi kegiatan
- b. Penyadaran masyarakat
- c. Pengorganisasian masyarakat
- d. Indikator perencanaan pembangunan desa
- e. Pelaksanaan kegiatan

##### **2. Data Sekunder**

Menurut Soewadi (2012:147) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Untuk melengkapi materi penelitian ini antara lain:

- a. Sejarah kantor kepala desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
- b. Gambar umum kantor kepala desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis



- c. Visi Dan Misi
- d. Tugas pokok dan fungsi kepemimpinan pada Kantor Kepala Desa Taeluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Menurut Pasolong (2012:131) observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian , direncanakan dan dicatat secara sistematis dan kontrol reliabelitasnya dan vailiditas.

##### **b. Questioner (Angket)**

Menurut sugiyono (2012:162) Questioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

##### **c. Wawancara**

Menurut sugiyono (2012:157) Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit /kecil.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan. Teknik ini digunakan untuk mendapat konsep teori dalam penelitian ini.

**G. Teknik Analisa Data dan Uji Hipotesis**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan dilakukan pengelompokan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan uraian dari penjelasan pelaksanaan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.



## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Mei				Maret				April				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kusioner																								
5	Rekomendasi Survy																								
6	Survy Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Hasil Laporan Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfrehensif skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggadaan Skripsi																								

Sumber modifikasi penulis :2018

## **I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan dan Kegunaan Masalah

### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

- A. Studi Kepustakaan
- B. Kerangka Pikir
- C. Hipotesis
- D. Konsep Operasional
- E. Operasional Variabel
- F. Teknik Pengukuran

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Tipe Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Populasi Dan Sampel
- D. Teknik Penarikan Sampel
- E. Jenis Dan Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisa Data Dan Uji Hipotesis
- H. Jadwal Kegiatan Penelitian
- I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

### **BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

- A. Sejarah Ringkas (Lembaga Tempat Penelitian)
- B. Struktur Organisasi
- C. Fungsi Dan Tugas Organisasi

D. Sumber Daya Organisasi

E. Informasi Lain Yang Relevan Dengan Judul Penelitian

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden

B. Hasil Pembahasan Data

C. Uji Hipotesis

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**



## BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Sejarah Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.

Selanjutnya pada Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut Kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan Kecamatan yang terluas yaitu 2.503 Km<sup>2</sup> (32,20%) Dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 Km<sup>2</sup> (5,46%). Jarak terjauh antara Ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban dengan jarak lurus 103 Km. sedangkan jarak terdekat

selain Kecamatan Bengkalis adalah Ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selatbaru, dan Ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 Km.1 Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai, diantara sungai yang ada didaerah ini sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk yaitu Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak Kecil 90 Km dan 1 Hasan Junus.

Sejarah Kabupaten Bengkalis Sebuah Tinjauan Paling Dasar Serta Beberapa Makalah. Pemda Kabupaten Bengkalis.2002. hal.13, 35 Sungai Mandau 87 Km, dengan letak geografi dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau-pulau disekitar Selat Melaka dan darat Sumatera serta beberapa sehingga mempengaruhi kondisi iklim. Iklim tersebut terdiri dari musim panas dan kemarau, kemarau yang terjadi pada bulan Febuari-September sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September-Januari.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, serta berpedoman kepada jumlah perizinan yang ada untuk bangunan rumah tempat tinggal, maka dapat digambarkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah < 1.000 Km<sup>2</sup> belum tentu memiliki jumlah bangunan rumah tempat tinggal yang besar pula dibandingkan dengan Kecamatan yang memiliki luas wilayah < 1.000 Km<sup>2</sup>. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan pusat perkembangan, kegiatan aktivitas ekonomi, konsentrasi perpindahan penduduk ke suatu wilayah tertentu dan berbagi factor lainnya yang turut mempengaruhi. Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/Desa dengan luas wilayah 7.793,93 Km.

tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang hedrogen mayonitas penduduknya adalah penganut agama Islam Disamping suku Melayu yang merupakan mayonitas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebgainya Bengkalis sebagai Ibukota kabupaten dikenal juga dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil telur ikan Terubuk. Yang sangat disukai masyarakat karena rasanya yang amat Lezat dan tentu saja meyebabkan harga telur ikan Terubuk menjdi amat mahal Kota lainnya adalah Duri sebagai baerah menghasikan minyak.

Di bawah ini nama-nama 8 Kecamatan yang ada dikabupaten Bengkalis yaitu: 1. Kecamatan Bantan Kecamatan Selat Baru Luas Kecamatan 424,40 km<sup>2</sup> 2. Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Luas Kecamatan 514,00 km<sup>2</sup> 3. Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Sungai Pakning Luas Kecamatan 1.128,00 km<sup>2</sup> 4. Kecamatan Mandau Kecamatan Duri Luas Kecamatan 937,47 km<sup>2</sup> 5. Kecamatan Rukat Kecamatan Batu Panjang Luas Kecamatan 1.524,85 km<sup>2</sup> 6. Kecamatan Rukat Utara Kecamatan Tanjung Medang Luas Kecamatan 628,50 km<sup>2</sup> 7. Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Luas Kecamatan 2.503,00 km<sup>2</sup> 8. Kecamatan Siak Kecil Kecamatan Lubuk Muda Luas Kecamatan 742,21 km<sup>2</sup> 36

B. VISI : Terwujudnya kabupaten Bengkalis sebagai model ngri maju dan makmur di Indonesia C.MISI : 1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak ,berani dan iklas . 2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber baya manusia untuk kemakmuran rakyat . 3. Terwujubnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahtraan rakyat Dalam rangka menjadikan kabupaten



Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur , kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spasial ,yakni: a. Gerbang Utama Fokus menjadikan pulau Pemerintahan ,pusat pendidikan Terpadu dan pusat pengembangan Budaya Melayu Serumpun. b. Gerbang Laksmana, Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, pelabuhan ekspor-inpor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat. c. Gerbang permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Pertenakan, Pertanian, dan Perkebunan. d. Gerbang Pesisir, Fokus untuk menjadikan Pulau Rupa sebagai pusat pariwisata unggulan Daerah, Pertenakan, Kelautan dan Perikanan.

## **B. Sejarah Berdirinya Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis**

Desa Teluk Rhu terletak dibagian pulau Rupa Kabupaten Bengkalis, Desa Teluk Rhu terletak berbatasan langsung dengan Selat Melaka, Teluk Rhu sempat di kenal dengan nama Desa TKI karna Desa Teluk Rhu banyak sekali pendatang yang datang dari ke pulau Jawa, Flores, hingga sumatra yang penyeberangan melalui Teluk Rhu termasuk penyeberangan ilegal.

Asal mulai suku asli melayu Teluk Rhu adalah dari suku melayu Malaysia,oleh karna itu bahasa melayu digunakan pada Desa Teluk Rhu ini berbeda dengan Desa lain di pulau Rupa, apalagi di daratan Sumatra.

Desa Teluk Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis ibu kotanya Tanjung Medang bagian yang berada di kabupaten bengkalis, yang terletak di wilayah bagi Utara Dari Kabupaten Bengkalis yang berbatas langsung dengan selat melaka yang berjarak 25 mil menuju portdiction melaka dan terdiri dari daratan dan lautan dan mempunyai 8 ( delapan ) desa yang ada di wilayah Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis, Yaitu Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Punak, Desa Kadur, Desa Hutan Ayu, Desa Putrisambilan. Di Samping Desa-Desa yang berada di daratan juga terdapat 5 ( lima ) buah pulau kecil yang tidak ada penghuninya yaitu: Pulau Babi, Pulau Beteng Aceh, Pulau Payung, Pulau Beruk, Pulau Kemunting.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa atau yang di sebut dengan nama lain selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Secara umum Desa Teluk Rhu memiliki sebagian besar terdiri dari Daratan dan Lautanyang memiliki Luas wilayah  $72.5 \text{ km}^2$  : 7.250 Ha dan keadaan alam Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis adalah datar yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatas dengan Pantai Selat Melaka
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Titi Akar
3. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Punak
4. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Medang

Desa teluk kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis memiliki jumlah penduduk terhitung pada tahun 2015 berjumlah 2.265 jiwa atau sama dengan 574 Kepala Desa ( KK ), sehingga menjadi Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dengan penduduk terbanyak yang ada di Kecamatan Rupa Utara, sumber penghasilan masyarakat Desa Teluk Rhu antara lain petani dan nelayan.

Potensi luas wilayah pada Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis masih terdapat berbagai wilayah yang masih belum di olah, terutama untuk lahan pertanian dan perkebunan Yang masih dapat di kembangkan oleh masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis atau pun investor dibidang perkebunan, dimana pada Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dilihat dari tanahnya sangat cocok untuk dijadikan perkembangan perkebunan seperti,sawit, bahkan perkebunan karet serta keindahan pantai yang bisa di jadikan objek wisata.

Sedangkan dilihat dari iklim pada Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis adalah beriklim tropis dimana pada bulan-bulan tertentu pada Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis terdapat pada musim kemarau dan musim hujan yang terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember terjadi musim hujan dan musim kemarau terjadi pada bulan-bulan maret dengan bulan agustus setiap tahun.

### C. Keadaan Dan Komposisi Penduduk Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

Penduduk Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari jenis kelamin, menunjukkan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan lebih banyak penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan, untuk lebih jelas dapat kita lihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 1V.1 Jumlah penduduk Desa Teluk Rhu dilihat menurut jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase ( % )
1	Laki-laki	1137	50,20
2	perempuan	1128	49,80
	Jumlah	2265	100 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Tahun 2019

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat di lihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis adalah 2265 orang. dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1137 atau 50,20 % dan jumlah penduduk perempuan 1128 atau 49,80 %.

Selanjutnya untuk melihat aktivitas Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara dalam pelaksanaan pembangunan harus memiliki pengurus yang mempunyai latar belakang pendidikan. Pendidikan merupakan dasar pokok yang mendasari dengan keahlian dan dilembananya. Pendidikan sangat menunjang pekerjaan yang dihasilkan. Berikut Tabel tentang tingkat

pendidikan perangkat Desa Teluk Rhu Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

**Table IV.2 Komposisi Perangkat Desa Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	SD	1	7,14 %
2	SLTP	-	-
3	SMA/ sederajat	13	92,86
Total		14	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Teluk Rhu, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara adalah SMA 13 orang persentase 92,86 dan pendidikan SD berjumlah 1 orang dan persentase, 7,14 orang yang terdiri dari Lelaki 8 orang dan Perempuan 6 orang, sedangkan persentase tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah SD.

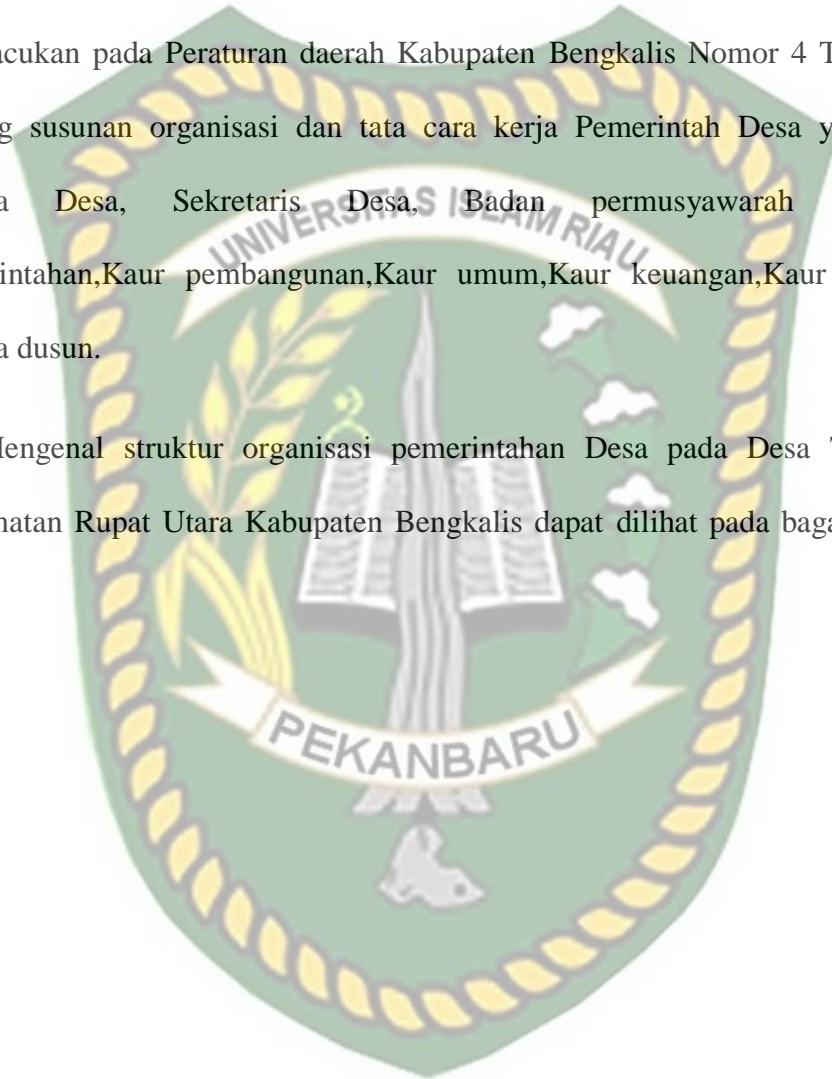
Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan tingkat Pendidikan pegawai Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara didominasi Pegawai berpendidikan SMA yang mempunyai pengalaman yang lebih tinggi dan profesional jika dibandingkan dengan Pegawai Pendidikan SD.

### **C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis**

Struktur organisasi merupakan pembagian atau jaringan kerja antara atasan dan para staf serta pegawai. Struktur organisasi menjelaskan wewenang

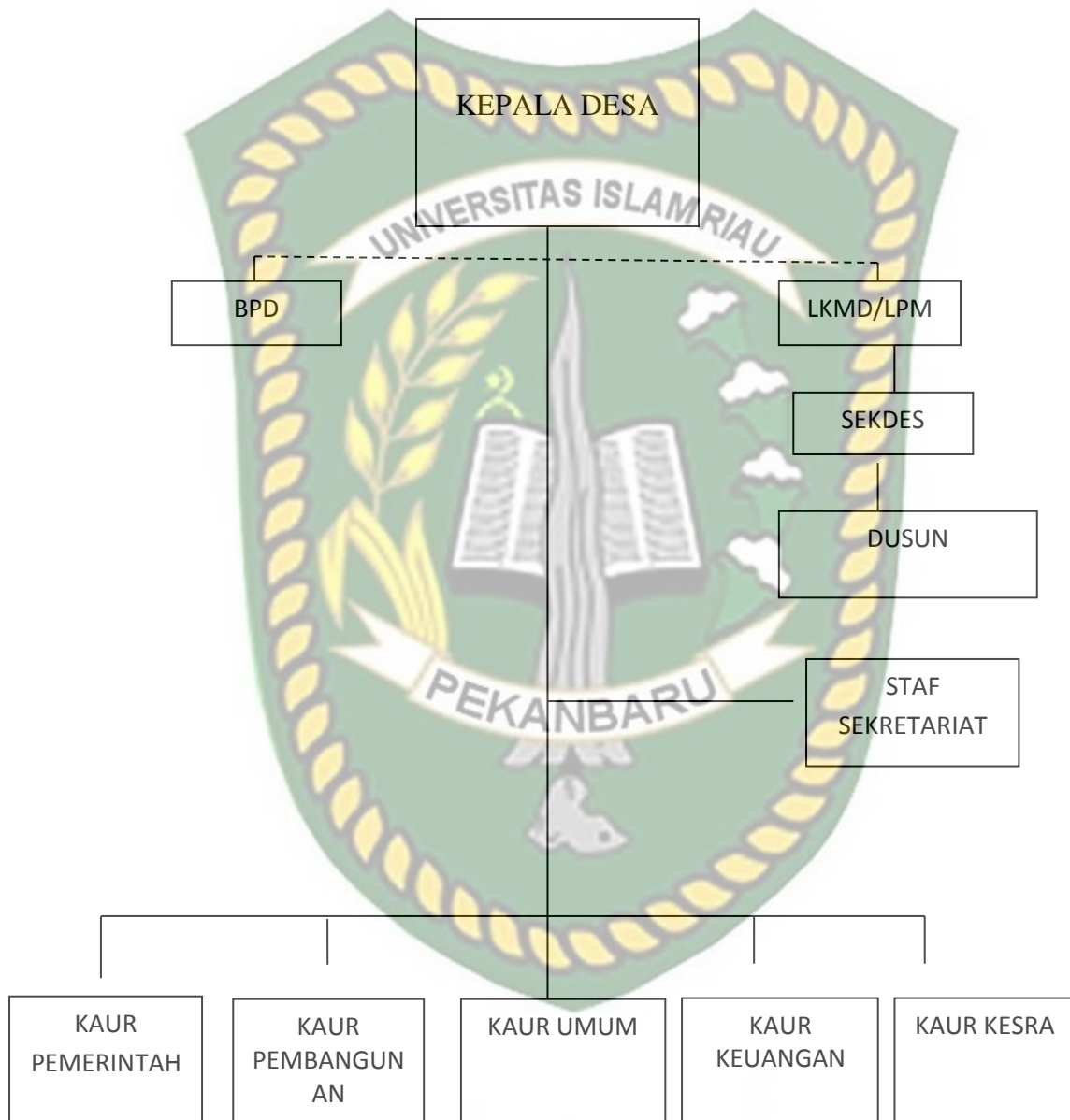
kekuasaan berasal dari puncak pimpinan yang dilimpahkan kepada kesatuan organisasi dibawahnya daam semua bidang pekerjaan adapun stuktur organisasi Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis mengacukan pada Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Pemerintah Desa yang terdiri Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan permusyawarah Desa,Kaur pemerintahan,Kaur pembangunan,Kaur umum,Kaur keuangan,Kaur Kesra,dan Kepala dusun.

Mengenal struktur organisasi pemerintahan Desa pada Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



## Struktur Organisasi Pemerintahan

### Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis



Sumber : Profil Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Tahun 2019

#### D. Sejarah Kantor Desa Teluk Rhu

Desa Teluk Rhu merupakan Desa yang menerapkan sistem Administrasi yang di terapkan oleh Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, Desa Teluk

Rhu Ibu Kota Kecamatan Rupa Utara yang Berada di Tanjung Medang bagian yang ada di Kabupaten Bengkalis yang berbatas langsung dengan Selat Malaka yang berjarak 25 mil menuju portdiction Malaka, dan mempunyai bentangan Pantai pasir putih 12 Km yang terletak di Desa Teluk Rhu dan Desa Tanjung Punak yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur lintas kapal –kapal international dan juga sebagai wilayah Wisata Bahari.

Pada awal berdirinya kantor kepala Desa dialamat jalan tenggiri dan pada tahun 2010 berpindah dijalan pelajar diDesa Teluk Rhu hingga sampai sekarang .Pada awal berdirinya kantor kepala desa dialamat jalan tenggiri dan pada tahun 2010 berpindah dijalan pelajar diDesa Teluk Rhu hingga sampai sekarang.

Sesuai dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintah daerah Kepenghuluan /Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang mana merupakan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Teluk Rhu merupakan Desa yang menerapkan sistem Administrasi yang di terapkan oleh Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, Kelurahan Teluk Teluk Rhu ini terletak di Jalan Pelajar yang memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatas dengan Pantai Selat Melaka
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Titi Akar
3. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Punak
4. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Medang



Dalam mewujudkan suatu Desa yang makmur Kantor Desa Teluk Rhu memiliki visi yang hendak di wujudkan diantara “ Menciptakan Desa Teluk Rhu Menjadi Desa Swadaya , Dan Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa Dan Mampu Bersaing Di Era Globalisasi Pada Tahun 2020”

Sedangkan misinya yang hendak di wujudkan ialah “ Menciptakan Desa Teluk Rhu Bebas Buta Huruf Sebagai Desa Yang Bersumberdaya Manusia Tinggi Dan Menjadi Desa Teluk Rhu Sebagai Desa Wisata Dan Jasa”.

Desa Teluk Rhu memiliki jumlah penduduk terhitung pada Tahun 2015 dapat diketahui jumlah Penduduk Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 1137 jiwa laki-laki dan 1128 jiwa perempuan terdiri dari 574 Kepala keluarga ( KK ) secara dapat disimpulkan bahwa Penduduk Desa Teluk Rhu kecamatan Rupert di dominasi jumlah Penduduk laki-laki.

Sedangkan dilihat dari iklim pada Desa Teluk Rhu adalah beriklim tropis, dimana pada bulan-bulan tertentu pada Desa Teluk Rhu terdapat musim kemarau dan musim hujan pada bulan September sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Maret dengan bulan Agustus dalam setiap tahunnya.

#### **E. Struktur Organisasi dan rincian Tugas pokok dan Fungsi**

Struktur organisasi merupakan pembagian atau jaringan kerja antara atasan dan para staf serta pegawai. Struktur organisasi menjelaskan wewenang

kekuasaan berasal dari puncak kepemimpinan yang dilimpah kepada bawahan dalam semua bidang pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Penyelenggaran Pemerintahan Desa dikeluarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, didalam Undang - Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa sebagai pihat lanjut dan ketentuan dari Undang-Undang No 06 Tahun 2014 di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 04 Tahun 2008, menjelaskan tentang Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kantor Desa Teluk Rhu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan Peraturan Desa
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa
- c. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- e. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- f. Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Undang-Undang
- h. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa

Struktur Kantor Desa Teluk Rhu berdasarkan Peraturan Nomor 04 Tahun 2008 menjelaskan fungsi tentang Desa Kecamatan Rupal Utara:

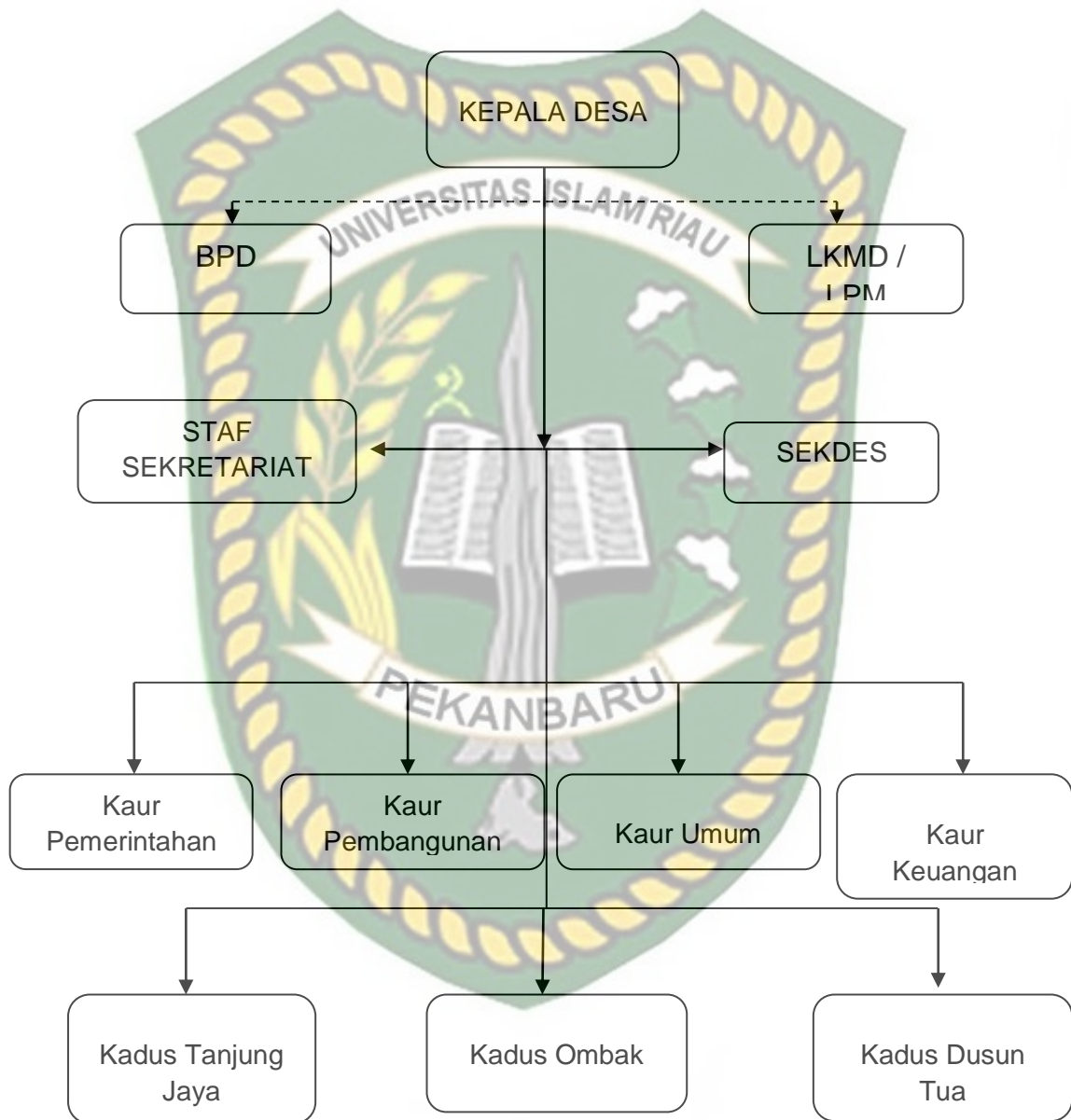
1. Kepala Desa
2. BPD
3. LKMD / LPM
4. Sekretaris Desa
5. Kaur Pemerintah
6. Kaur Pembangunan
7. Kaur Umum
8. Kaur Keuangan
9. Kaur Kesra
10. Staf Sekretariat
11. Kepala Dusun.

Berikut adalah gambar Struktur Pemerintahan Desa Teluk RHU Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis:



## Struktur Organisasi dan Tata Kerja

### Kantor Desa Teluk Rhu



Sumber : Profil Kantor Desa Teluk Rhu Tahun 2019

Dalam Pemerintahan Desa diatur dalam susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, yang mana dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008

dijelaskan mengenai rincian tugas dari Kantor Desa Teluk Rhu. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari tujuh (7) Bidang tersebut adalah :

### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa sebagai Pimpinan pada pemerintahan Desa mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c. Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa.
- d. Mengajukan rancangan peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan berbagai peraturan Desa.
- e. Membina perekonomian Desa.
- f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang pada Desa.
- g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

### **2. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )**

BPD merupakan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas dan Kewenangan

sebagai berikut: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa.
- b. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- c. Menetapkan kebijakan proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

- e. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan kepala Desa dan peraturan Perundang-Undangan lain, pelaksanaan keputusan Kepala Desa dan kebijakan Pemerintahan Kepala Desa.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Kepala Desa terhadap rencana perjanjian dengan pihak ketiga yang memberikan beban kepada masyarakat.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### 3. LKMD/LPM

LKMD/LPM mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
- b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
- c. Sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat
- d. Mendorong, mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga
- e. Membangun kerja sama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup

Memberdayakan dan mengerakan potensi pemuda dalam pembangunan

#### 4. Sekretaris Desa

Sekretarian Desa sebagai unsur Staf dan unsur pelaksanaan Kepala Desa Sekretarian Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat desa.
- c. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
- d. Mengumpulkan bahan, evaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan tugas pemerintah desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- e. Melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menyusun program kerja tahunan dan laporan.

#### 5. Kaur Pemerintah

Kaur Pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan.
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa.
- d. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pertahanan sipil.

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketertiban dan ketentraman.
- f. Melaksanakan pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- g. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil.

#### **6. Kaur Pembangunan**

Kaur pembangunan pada Desa Teluk Rhu mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan administrasi pembangunan di wilayah desa.
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dan pembangunan pada desa.
- c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna membuat daftar usaha proyek dan mencatat daftar isian proyek.
- e. Merencanakan usulan anggaran belanja desa untuk dikonsultasikan dengan Badan Pemerintah Daerah.
- f. Mengumpulkan dan menganalisa sumber data penghasilan desa baru untuk dikembangkan.
- g. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang pertanian, perdagangan, industry maupun perekonomian lainnya.
- h. Mengikuti dan melaporkan perkembangan dan keadaan perekonomian (Koperasi Unit Desa, Perkreditan dan Lembaga perekonomian lainnya).

#### **7. Kaur umum**



Kaur Umum pada Kantor Desa Teluk Rhu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
- b. Melaksanakan surat hasil Perundangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya.
- c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- d. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa.
- f. Melaksanakan buku administrasi umum.
- g. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.

#### **8. Kaur Keuangan**

Kaur Keuangan pada Desa Teluk Rhu mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang.
- b. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Melakukan administrasi keuangan.
- d. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dan pembangunan yang dinilai dengan uang.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.

#### **9. Kaur kesra**

Kaur kesra mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

#### 10. Staf sketariat

Sketariat Desa Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

- a. Sebagai unsur Staf / Administarsi mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, dan melaporak pelaksanaan urusan organisasi Melakukan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat desa.
- c. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
- d. Mengumpulkan bahan, evaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan tugas pemerintah Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- e. Melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menyusun program kerja tahunan dan laporan.

#### D. KEPALA DUSUN

Kepala Dusun dapat membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya sesuai dengan

Peraturan Perundangan – Undangn yang berlaku, Fungsi Kepala Dusun sebagai berikut :

- a. Sebagai unsur pelaksana tugas Desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Menjalankan kegiatan Desa dalam kepemimpinan desa di wilayah kerjanya.

### **C. Keadaan dan Komposisi Pegawai Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara**

Berdirinya suatu organisasi yang merupakan wadah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan orang – orang menggerakan organisasi tersebut. Setiap organisasi atau badan usaha jenis lainnya harus mempunyai pegawai atau orang bekerja untuk mengelola dan melaksanakan aktivitas organisasi

Kemampuan Pegawai pada Kepala Desa Teluk Rhu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan Misi yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan Kepemimpinan dapat mengarahkan dan membawa pegawainya kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk melihat dengan lebih jelas tentang keadaan serta komposisi Pegawai pada kantor Desa Teluk Rhu dalam dapat melaksanakan tugas dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Umur Jenis Kelamin

Faktor umur para Pegawai Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara memengaruhi aktivitas – aktivitas Pegawai dalam kelangsungan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Kepemimpinan,

sebab faktor umur dapat menunjukkan berbagai pengalaman dan pemahaman serta keterampilan seorang pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab konsekuensinya akan dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan tekanan batin atau stres. Pegawai Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Menurut Kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Table IV.3 Pegawai Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Klasifikasi pegawai		Jumlah	Persentase%
		PNS	Honorer		
1	Laki-laki	-	8	8	57.15
2	Perempuan	-	6	6	42.85
Jumlah				14	100 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Tahun 2019

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat diketahui jumlah pegawai Jenis Kelamin laki – laki berjumlah 8 Orang, dan status PNS 0 Orang, yang berstatus Honorer 8 Orang ( 57,15 %), Pegawai Honorer perempuan berjumlah 6 Orang dan jumlah Pegawai PNS 0 Orang (42,85 %) dan 1 Pegawai Honorer sebagai pelaksanaan pembantu tugas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara di dominasi oleh Jenis Kelamin Laki-laki.

Upaya menunjang suatu keberhasilan dalam melaksanakan beban tugas, latar belakang Pendidikan formal pegawai dapat memberi bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan baik dalam bidang Administrasi maupun dalam hal

kemampuan kerja dilapangan, untuk itu lebih jelas tentang Pendidikan Pegawai Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table IV. 4 Keadaan dan Komposisi Pegawai Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	SD	1	7,14 %
2	SLTP	-	-
3	SMA/ sederajat	13	92,86
Total		14	100 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teluk Rhu, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara adalah SMA 13 orang persentase 92,86 % dan pendidikan SD berjumlah 1 orang dan persentase, 7,14 % orang yang terdiri dari Lelaki 8 orang dan Perempuan 6 orang, sedangkan persentase tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah SD.

Dasarkan tabel diatas dapat dikatakan tingkat Pendidikan pegawai Pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara didominasi Pegawai berpendidikan SMA yang mempunyai pengalaman yang lebih tinggi dan profesional jika dibandingkan dengan Pegawai Pendidikan SD.

Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara adalah suatu wadah Organisasi Pemerintah yang harus dijalankan dalam pengambilan Keputusan, maka penulis memaparkan Golongan kepangkatan Pegawai pada Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara, penjabaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table IV.V Keadaan Komposisi Pegawai pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Berdasarkan Pangkat/ Golongan**

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah	Persentase %
1.	Kepala dusun	3	11,11 %
2.	Kaur	5	18,51 %
3.	Staf	5	18,51 %
4.	Honorar	14	51,87 %
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teluk Rhu, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Kepala Dusun berjumlah 3 Orang Dengan Persentase (11,11%), Kaur berjumlah 5 Orang dengan Persentase (18,51%), Staf berjumlah 5 Orang (18,51%) dan Pegawai Honorar berjumlah 14 Orang dengan Persentase (51,87%)

#### **D. Sarana Dan Prasarana Pada Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.**

Didalam menjalankan tugas dan kegiatannya pegawainya, organisasi telah memperhatikan Sarana dan Prasarana yang diberikan pada Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara untuk menunjang kelancaran kerja tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, adapun perlengkapan Kantor Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table IV. 6 Sarana dan Prasarana pada Kantor Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara

No	Jenis/Barang	Jumlah ( Unit )	Kondisi		
			Baik ( unit )	Rusak ringan ( unit )	Rusak berat ( unit )
1	Mesin Tik Kufa,B	1	1	-	-
2	Kursi Plastik	100	100	-	-
3	Meja kerja	1	1	-	-
4	Kursi kerja	10	10	-	-
5	Lemari arsip	2	2	-	-
6	Kipas Angin	3	3	-	-
7	Printel canon	1	1	-	-
8	Stavolt 300 w	1	1	-	-
9	Infocus	1	1	-	-
10	Kamera Digital	1	1	-	-
11	Laptop Toshiba	1	1	-	-
12	Parabola	1	1	-	-
13	Padium	1	1	-	-
14	Printer Brother	1	1	-	-
15	Note Book Acer	1	1	-	-
16	Trali Pintu	6	6	-	-
17	Trali Jendela	12	12	-	-

18	Trali Pintu Gudang	1	1	-	-
19	Printer CANON	1	1	-	-

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teluk Rhu, Tahun 2019

Data diatas menggambarkan perlengkapan kantor Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara yang tersedia cukup memadai dalam menunjang Pengurusan dibidang Pelayanan kepada masyarakat.





## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden, yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden analisis yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Identitas responden mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Sedangkan untuk masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut :

##### 1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis dan masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten

Bengkalis dan masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Peresentase
1	Laki-laki	40	59%
2	Perempuan	28	41%
	Jumlah	68	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden pegawai mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk laki-laki sebanyak 40 orang dengan peresentase 59%, dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang dengan peresentase 41%. Dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 68 orang.

## 2. Umur

Umur merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Seperti diketahui bahwa pegawai yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada pegawai yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih ceapats mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang umurnya lebih muda. Untuk

lebih jelasnya mengenai umur Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel V.2 Distribusi Responden mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	20-30	12	18%
2	31-40	26	38%
3	41-50	30	44%
4	>50	-	-
Jumlah		68	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden pegawai jika dilihat dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk umur 20-30 tahun berjumlah 12 orang dengan presentase 18%, umur 31-40 tahun berjumlah 26 orang dengan presentase 38%, dan umur 41-50 tahun berjumlah 30 orang dengan presentasi 44% dan umur >50 tahun tidak ada.

### 3. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertindak laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat

pendidikan responden Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.3 Distribusi Responden Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA	60	-
2	Diploma	5	29%
3	Strata 1	3	59%
4	Strata 2	-	12%
Jumlah		68	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden pegawai dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan. Untuk pendidikan Diploma berjumlah 5 orang dengan presentase 29% untuk Strata 1 berjumlah 10 orang dengan presentase 59%, dan untuk pendidikan Strata 2 berjumlah 2 orang dengan presentase 12%. Dengan adanya peningkatan pendidikan maka sumber daya di Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis akan lebih mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan penuh rasa tanggung jawab.

**B. Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**

Dari data yang di peroleh penulis dari hasil wawancara dan kuesioner dengan responden masyarakat dan juga Pegawai di Kantor Desa Teluk Rhu, maka penulis akan menyajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk uraian

serta gambaran mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.

Untuk mengetahui Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

#### **A. Pemimpin Sebagai Penentu Arah**

Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi tersebut.

Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan, kemampuan para pejabat pimpinan sebagai penentu arah yang hendak ditempuh dimasa depan merupakan saham yang sangat penting dalam kehidupan organisasional, strategi, taktik, tehnik, dan keputusan oprasional yang tidak tepat maka akan menyebabkan organisasi bergerak pada arah yang tidak benar apabila dibiarkan berlanjut, bukan hanya akan merugikan organisasi yang bersangkutan, akan tetapi bahkan akan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup organisasi tersebut.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Pemimpin Sebagai Penentu Arah yaitu:

1. Perumusan Strategi
2. Pengambilan Keputusan

### 3. Memberi Motivasi

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Pemimpin Sebagai Penentu Arah maka dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.4 Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan indikator Pemimpin Sebagai Penentu Arah.**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Perumusan strategi	5 (71%)	2 (27%)	-	7 (100%)
2	Penambilan keputusan	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
3	Memberikan motivasi	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
Jumlah		17	4	-	21
Rata-rata		6	1	-	7
Presesntase		86%	14%	-	100%

Dari tabel V.4 dapat diketahui bahwa tanggapan responden kaur umum dan staf desa, berdasarkan pemimpin sebagai penentu arah. terhadap indikator yang diatas dengan item yang dinilai mengenai sub indikator Perumusan Strategi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan atau proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan desa, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan pelayanan terbaik, untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 5 orang dengan presentase 71%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 27%, dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai sub indikator Pengambilan Keputusan mengenai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif

yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternative yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. Dan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6 orang dengan presentase 86% dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 14% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai memberikan motivasi yakni antara keinginan dan enenrgi untuk mencapai tujuan tertentu, karena fungsi utama kepemimpinan adalah untuk memimpin, maka kemampuan untuk mempengaruhi orang adalah hal yang penting. Dan responden yang mengatakan Baik sebanyak 6 orang atau dalam presentase 86%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 14% responden yang mengatakan cukup baik dan juga yang mengatakan kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas berdasarkan Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan bahwa, pada indikator Pemimpin Sebagai Penentu Arah dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 6 orang dengan presentase 86%. Artinya Pemimpin Sebagai Penentu Arah di Desa Teluk Rhu Kabupaten Bengkalis tersebut sampai saat ini sudah memberikan motivasi dan juga program-program yang akan dijalankan di desa tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.5      Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis Terhadap Indikator Pemimpin Sebagai Penentu Arah**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Perumusan strategi	14 (25%)	35 (61%)	8 (14%)	57 (100%)
2	Pengambilan keputusan	10 (18%)	45 (79%)	2 (3%)	57 (100%)
3	Memberikan motivasi	15 (26%)	38 (67%)	4 (7%)	57 (100%)
Jumlah		39	118	14	171
Rata-rata		13	39	5	57
Presesntase		27%	68%	9%	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2019*

Dari tabel V.5 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator yang diatas dengan item yang dinilai mengenai Perumusan Strategi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan atau proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan desa, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan pelayanan terbaik. Untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 14 orang dengan presentase 25%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 35 orang dengan presentase 61%, dan kategori kurang baik sebanyak 8 orang dengan presentase 14%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Pengambilan Keputusan mengenai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternative yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap



pilihan, dan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 10 orang dengan presentase 18% dan sebanyak 45 orang atau dalam presentase 79% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik berjumlah 2 orang atau dalam presentase 3%.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai Memberikan Motivasi yakni antara keinginan dan enenrgi untuk mencapai tujuan tertentu, karena fungsi utama kepemimpinan adalah untuk memimpin, maka kemampuan untuk mempengaruhi orang adalah hal yang penting. Dan untuk responden masyarakat yang mengatakan Baik sebanyak 15 orang atau dalam presentase 26%, sebanyak 38 orang atau dalam presentase 67% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan presentase 7%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, pada indikator Pemimpin Sebagai Penentu Arah dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 39 orang dengan presentase 68%. Berdasarkan Pemimpin Sebagai Penentu Arah sudah dapat dinilai Cukup baik karena perumusan strategi, pengambilan keputusan serta memberikan motivasi sudah dijalankan dengan “Cukup baik”.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Mansur selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Arah yang ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia itu. Arah yang dimaksud tertuang dalam strategi dan taktik yang

disusun dan dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan kepala desa seperti, Membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di desa tersebut”.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Suhaili selaku Sekretaris desa beliau mengataakan bahwa :

“Setiap pemimpin harus mempunyai strategi dan taktik yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang Kepala Desa juga pasti mempunyai strategi dan taktik tersendiri dalam berusaha mewujudkan tujuan mereka dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang ada dengan faktor yang ada. Apabila Kepala Desa tidak mempunyai startegi dan taktik tersendiri akan sulit menjalankan kepemimpinannya khususnya bila terjadi tantangan, hambatan atau perubahan.”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Rudi Kamarudin selaku BPD desa Teluk Rhu, beliau mengataakan bahwa :

“Menurut saya, strategi dan taktik yang dilakukan beliau itu Cuma mengadakan sosialisasi ke masyarakat saja, artinya semua program dari masyarakat itu adalah wadah dari program yang mendukung dari program yang dibuat oleh kabupaten. Dan mengajak masyarakat mendukung untuk setiap program dari pemerintah jadi masyarakat ini Cuma menerima program itu.”

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Salbaini selaku Ketua LKMD/LPM, beliau mengataakan bahwa :

“Apabila kami rapat atau ingin mengambil keputusan bapak kepala desa sebagai pemegang kedudukan tertinggi untuk mengambil suatu keputusan. Kami selalu menghormati keputusan beliau karna setiap keputusan yang diambil telah mempertimbangkan banyak hal sebelumnya.”

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Tomi selaku masyarakat desa teluk Rhu, beliau mengataakan bahwa :

“ Mengenai pemimpin selaku penentu arah kepala desa sampai saat ini belum memberikan motivasi ataupun program-program yang akan dijalankan, ya kami sebagai masyarakat biasanya hanya ikut saja apa yang di jalankan oleh kepala desa, selagi dalam hal yang positive kami ikut saja dek, tapi kalau musyawarah bersama mengenai program yang akan dijalankan kami tidak pernah diundang dek, paling Cuma atasan nya saja dek, apalagi contohnya acara pantai

yang rutin setiap tahun diadakan sekarang sudah tidak berjalan lagi dek, lalu sarana dan Prasarana juga banyak yang kurang memadai dek”.

Berdasarkan Hasil Kuisisioner dan wawancara mengenai Pemimpin Sebagai Penentu Arah mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis yang dinilai dari beberapa indikator dapat digolongkan kedalam kategori “Cukup Baik”. Artinya Pemimpin Sebagai Penentu Arah di Desa Teluk Rhu Kabupaten Bengkalis tersebut yakni strategi dan taktik yang dilakukan beliau itu hanya mengadakan sosialisasi ke masyarakat saja, artinya semua program dari masyarakat itu adalah wadah dari program yang mendukung dari program yang dibuat oleh kabupaten. Dan mengajak masyarakat mendukung untuk setiap program dari pemerintah jadi masyarakat ini hanya menerima program tersebut.

Berdasarkan Observasi Peneliti dilapangan yaitu, masih ditemukan hambatan dilapangan yaitu masih kurang berjalannya program-program yang akan dijalankan, hingga sampai saat ini program tersebut belum terlaksana dengan baik, dan juga masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga dalam hal pemimpin selaku penentu arah belum dapat berjalan dengan maksimal.

## **2. Pemimpin Sebagai Wakil dan Juru Bicara**

Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan, dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat

oleh pimpinan yang lebih rendah. Serta pengetahuan tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi sebagai pelaksanaan dari berbagai keputusan yang telah diambil.

Dalam organisasi yang bersifat formal, tidak semua anggota organisasi memiliki wewenang untuk melakukan hubungan keluar dengan pihak atau organisasi lain, bahkan tidak pada semua tingkat jabatan pimpinan. Pada analisa terakhir, pemimpin puncak organisasilah yang menjadi wakil dan juru bicara resmi organisasi. Sebagai wakil dan juru bicara resmi organisasi, fungsi pimpinan tidak terbatas pada pemeliharaan hubungan baik saja, tetapi harus membuahkan perolehan dukungan yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya.

Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, pimpinan puncak organisasilah yang menjadi wakil dan juru bicara resmi organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak diluar organisasi. Fungsi pimpinan tidak terbatas pada pemeliharaan hubungan baik saja, tapi harus membuahkan perolehan dukungan yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya.

Adapun unsur-unsur pertanyaan Pemimpin Sebagai Wakil dan Juru Bicara yang meliputi indikator yaitu:

1. Membentuk suasana organisasi yang baik
2. Pemeliharaan hubungan didalam organisasi
3. Pemeliharaan hubungan diluar organisasi

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Pemimpin Sebagai Wakil dan Juru

Bicara maka dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.6 Tanggapan Responden Kaur Umum Dan Staf Desa Berdasarkan Pemimpin Sebagai Wakil Dan Juru Bicara**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	2	3	4	5	6
1	Membentuk suasana organisasi	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
2	Pemeliharaan hubungan didalam organisasi	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
3	Pemeliharaan hubungan diluar organisasi	4 (57%)	3 (43%)	-	7 (100%)
Jumlah		15	6	-	21
Rata-rata		5	2	-	7
Presesntase		71%	29%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.6 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap indikator Pemimpin Sebagai wakil dan juru bicara dengan item yang dinilai mengenai Membentuk suasana organisasi yaitu terdapat pihak-pihak yang saling terkait antara lain pemimpin sebagai atasan dan pegawai atau karyawan sebagai bawahan. Maka untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 5 orang dengan presentase 71%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 29%, dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Pemeliharaan Hubungan yakni usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi dan didalam organisasi, untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6

orang dengan presentase 86% dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 14% yang mengatakan Cukup Baik, dan juga yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu, responden yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 57%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 43% yang mengatakan cukup baik dan juga yang mengatakan kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, pada indikator Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 7 orang dengan presentase 64%. Artinya lembaga kemasyarakatan desa, bersama kepala desa sebagai wakil juru bicara kepada masyarakat sudah berjalan dengan yang semestinya serta dengan organisasi diluar itu juga sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.7      Tanggapan Responden Masyarakat Berdasarkan Pemimpin Sebagai Wakil Dan Juru Bicara**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Membentuk suasana organisasi	9 (16%)	44 (77%)	4 (7%)	57 (100%)
2	Pemeliharaan hubungan didalam organisasi	5 (9%)	49 (86%)	3 (5%)	57 (100%)
3	Pemeliharaan hubungan diluar	6 (11%)	48 (84%)	3 (5%)	57 (100%)

organisasi				
Jumlah	20	141	10	171
Rata-rata	7	47	3	57
Presentase	12%	83%	5%	100%

Sumber : Data Olah lapangan, 2019

Dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator Pemimpin Sebagai Wakil dan Juru Bicara dengan item yang dinilai mengenai membentuk suasana organisasi yaitu terdapat pihak-pihak yang saling terkait antara lain pemimpin sebagai atasan dan pegawai atau karyawan sebagai bawahan. Dan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 9 orang dengan presentase 16%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 44 orang dengan presentase 77%, dan kategori kurang baik sebanyak 4 orang dengan presentase 7%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai pemeliharaan hubungan didalam organisasi yakni usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi dan didalam organisasi . Dan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 5 orang dengan presentase 9% sebanyak 49 orang atau dalam presentase 86% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 5%.

Dan pada item ketiga yaitu Pemeliharaan hubungan diluar organisasi yakni usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi. Responden yang mengatakan Baik sebanyak 6 orang atau dalam presentase 11%, sebanyak 48 orang atau dalam presentase 84% masyarakat yang

mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau dengan presentase 5%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, pada indikator Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 47 orang dengan presentase 83%. Artinya masyarakat biasa hanya mengikuti apa saja yang menjadi program-program yang akan dijalankan, mengenai hubungan didalam atau diluar organisasi masyarakat juga kurang mengetahui, karena jika ada rapat-rapat desa tidak semua masyarakat yang dilibatkan.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Mansur selaku Kepala Desa Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Sebagai Kepala Desa memang harus dituntut atau memang harus memiliki skill dalam berbicara, berbicara mengenai apa? Ya itu tadi dek berbicara mengenai program-program yang akan dijalankan, bersama organisasi-organisasi yang lainnya, seperti BPD ataupun bersama LKMD/LPM, pastinya setiap ada program-program yang akan dijalankan pasti kami selalu bermusyawarah terlebih dahulu”.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Suhaili selaku Sekretaris Desa Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Memang sudah seharusnya Kepala Desa memang harus dituntut atau memiliki skill dalam berbicara apabila ada program-program yang akan dijalankan pasti kami selalu bermusyawarah terlebih dahulu”.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Salbaini selaku Ketua LKMD/LPM beliau mengataakan bahwa :



“Kami selaku lembaga kemasyarakatan desa, bersama kepala desa sebagai wakil juru bicara kepada masyarakat menurut saya sudah berjalan dengan yang semestinya ya dek, hubungan dengan organisasi luar itu juga sudah berjalan dengan baik dek”.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Rudi Kamarudin selaku ketua BPD, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai pemimpin selaku wakil dan juru bicara saya rasa sudah berjalan dengan baik ya dek, tentunya kalau ada program-program yang akan dijalankan pasti selalu bermusyawarah terlebih dahulu dan juga kepala desa saya rasa sudah maksimal mengenai pemeliharaan hubungan diluar serta diluar organisasi”

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat desa Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat biasa ya hanya mengikuti saja apa program-program yang akan dijalankan dek, mengenai hubungan didalam atau diluar organisasi kami kurang tau ya dek, soalnya kalau ada rapat-rapat desa tidak semua masyarakat yang dilibatkan dek, hanya sebaaian orang saja yang dilibatkan dek.”

Berdasarkan hasil observasi lapangan mengenai Pemimpin Sebagai Wakil dan Juru Bicara mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan baik, hanya saja berdasarkan tanggapan masyarakat masih ditemui hambatan-hambatan yaitu tidak dilibatkan atau diikuti sertakan seluruh masyarakat mengenai program-program yang akan dijalankan, sehingga pemimpin sebagai wakil dan juru bicara dirasa belum efektif dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Pemimpin Sebagai Komunikator

Kunci yang paling penting yang harus dimiliki setiap pemimpin adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Tidak jarang pemimpin yang mempunyai visi atau misi yang besar gagal menyampaikan visi dan misi yang ia inginkan kepada anak buahnya atau teamnya karena ketidakmampuan berkomunikasi dengan baik sehingga teamnya kehilangan arah. Komunikasi yang efektif merupakan usaha untuk menciptakan suasana saling pengertian, melancarkan suatu usaha, membangkitkan kesadaran dan idealisme serta memotivasi untuk bekerja lebih keras lagi.

Didalam komunikasi yang efektif, seorang komunikator yang baik tidak selalu memimpin percakapan tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain memberikan jawaban-jawabannya. Pada waktu-waktu tertentu dia juga harus bertindak sebagai pendengar yang baik. Komunikasi yang tidak lancar antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi atau pemerintahan sering berpengaruh pada produktifitas kerja yang cenderung buruk karena terganggu suatu pekerjaan yang tidak hanya melibatkan bagian-bagian tertentu tetapi juga meluas pada bagian lain pekerjaan yang lain. Perlu diperhatikan bahwa dengan membuka komunikasi yang efektif dengan bawahan akan menjadi pendorong bagi para bawahannya untuk bekerja secara optimal, efisien, efektif dan meningkatkan produktifitas kerja mereka yang secara tidak langsung akan memenuhi target dan sasaran bagi suatu organisasi.

Pemeliharaan hubungan baik ke luar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, penerahan bawahan dan menyampaikan informasi kepada pihak lain.

Menurut Effendy (1994:116) tentang manajer sebagai komunikator sebagai berikut: “Sebagai komunikator, seorang pemimpin organisasi, manajer, atau administrator harus bisa memilih salah satu dari berbagai metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan situasi pada waktu komunikasi dilancarkan.” Dalam hubungan itu menurut Mintzberg dalam Effendy (1994:116), menyatakan bahwa wewenang formal seorang manajer menyebabkan timbulnya tiga peranan antarpersonal (Interpersonal Roles) yang pada gilirannya menyebabkan adanya tiga peranan informasi (Informal Roles), dan pada gilirannya pula menyebabkan sang manajer melakukan peranan memutuskan.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Pemimpin Sebagai Komunikator yaitu:

1. Mampu menjelaskan
2. Mampu mempengaruhi
3. Mampu menyatukan

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Pemimpin Sebagai Komunikator maka dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.8 Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan Pemimpin Sebagai Komunikator.**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Mampu menjelaskan	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
2	Mampu mempengaruhi	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
3	Mampu menyatukan	4 (57%)	3 (43%)	-	7 (100%)
Jumlah		15	6	-	21
Rata-rata		5	2	-	7
Preesentase		71%	29%	-	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2019*

Dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap indikator Pemimpin Sebagai Komunikator dengan item yang dinilai mengenai Pemimpin Mampu Menjelaskan yakni sebuah kemampuan seorang pemimpin yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa menjelaskan kepada orang lain atau memandu pihak tertentu atau masyarakat untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan di desa Teluk Rhu tersebut. Untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 6 orang dengan presentase 86%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 1 orang dengan presentase 14%, dan kategori kurang baik tidak ada tanggapan dari responden.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Pemimpin Mampu mempengaruhi yakni sebuah kemampuan seorang pemimpin yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu atau masyarakat untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan di desa Teluk Rhu tersebut. Untuk kategori penilaian Baik sebanyak 5 orang dengan

presentase 71% dan sebanyak 2 orang atau dalam presentase 29% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga responden yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai Mampu Menyatukan yakni mempersatukan masyarakat di Desa Teluk Rhu tersebut. Persatuan itu sedemikian penting. Bahkan menjadi syarat keberhasilan sebuah organisasi. Tanpa persatuan tidak akan mungkin tujuan bersama bisa diraih. Maka responden yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 57%, dan pegawai yang mengatakan cukup baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 43%, dan juga yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, pada indikator Pemimpin sebagai komunikator dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 9 orang dengan presentase 82%. Artinya Kunci yang paling penting yang harus dimiliki setiap pemimpin adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Begitu juga kepala desa memang harus dituntut untuk mampu menjelaskan mengenai program-program yang akan dijalankan di desa teluk Rhu tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator pemimpin sebagai komunikator mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.9      Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pemimpin Sebagai Komunikator**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Mampu menjelaskan	9 (16%)	45 (79%)	3 (5%)	57 (100%)
2	Mampu mempengaruhi	10 (18%)	43 (75%)	4 (7%)	57 (100%)
3	Mampu menyatukan	10 (18%)	38 (66%)	9 (16%)	57 (100%)
Jumlah		29	126	16	171
Rata-rata		10	42	5	57
Presestantase		17%	74%	9%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator Pemimpin Sebagai Komunikator dengan item yang dinilai mengenai Pemimpin mampu menjelaskan Menjelaskan yakni sebuah kemampuan seorang pemimpin yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa menjelaskan kepada orang lain atau memandu pihak tertentu atau masyarakat untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan di desa Teluk Rhu tersebut. Untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 19 orang dengan presentase 16%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 45 orang dengan presentase 79%, dan kategori kurang baik sebanyak 3 orang dengan presentase 5%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Mampu Mempengaruhi yakni sebuah kemampuan seorang pemimpin yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu atau masyarakat untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan di desa Teluk Rhu tersebut. Untuk kategori penilaian Baik sebanyak 10 orang dengan

presentase 18% dan sebanyak 43 orang atau dalam presentase 75% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 7%.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai mampu menyatukan yakni mempersatukan masyarakat di Desa Teluk Rhu tersebut. Persatuan itu sedemikian penting. Bahkan menjadi syarat keberhasilan sebuah organisasi. Tanpa persatuan tidak akan mungkin tujuan bersama bisa diraih. Dan yang mengatakan Baik sebanyak 10 orang atau dalam presentase 18%, sebanyak 38 orang atau dalam presentase 66% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 9 orang atau dengan presentase 16%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, pada indikator Pemimpin Sebagai Komunikator dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 9 orang dengan presentase 82%. Artinya sampai saat ini belum maksimal mengenai pemimpin sebagai komunikator, karena kepala desa selalu sibuk, dan apabila masyarakat ada keperluan sering diwakilkan dengan sekretarisnya, dan juga seperti gotong royong juga sudah jarang dilakukan untuk sekarang ini.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Mansur selaku Kepala Desa Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Kunci yang paling penting yang harus dimiliki setiap pemimpin adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Tidak jarang pemimpin yang mempunyai visi atau misi yang besar gagal menyampaikan visi dan misi yang ia inginkan kepada anak buahnya atau teamnya karena ketidak mampuan berkomunikasi dengan baik sehingga teamnya kehilangan arah, begitu juga kepala desa memang harus dituntut untuk mampu menjelaskan mengenai program-program yang akan dijalankan di desa teluk Rhu tersebut.”

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Suhaili selaku Sekretaris Desa

Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Kepala desa memang harus dituntut untuk mampu menjelaskan mengenai program-program yang akan dijalankan di desa teluk Rhu tersebut, memberi arahan kepada masyarakat serta dapat berkomunikasi dengan baik kepada Pegawai di kantor desa tersebut, agar tujuan untuk membangun desa tersebut dapat berjalan dengan maksimal.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Rudi Kamrudin Selaku Ketua BPD desa Teluk Rhu beliau mengataakan bahwa :

“Interaksi terhadap bawahan didalam Kantor sebenarnya sudah dapat dikatakan baik. Namun interaksi diluar Kantor Desa Teluk Rhu, kurang berusaha kedekatan personal dengan bawahannya dalam upaya menciptakan keharmonisan dan suasana kerja yang nyaman bagi bawahannya”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Salbani selaku ketua LKMD/LPM, beliau mengatakan bahwa :

“ Mengenai Pemimpin sebagai komunikator dirasa belum cukup maksimal ya dek, contohnya saja hubungan diluar desa masih kurang maksimal dan juga program-program yang akan dijalankan juga masih belum maksimal dek seperti acara pantai yang setaip tahunnya diadakan sekarang sudah tidak berjalan lagi dek”

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat desa Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Sebagai kepala desa memang harus dituntut untuk mampu mempengaruhi dan juga mengajak masyarat serta lembaga lembaga yang lainnya untuk menjalankan program demi kemajuan desanya, akan tetapi sampai saat ini belum maksimal ya dek pemimpin sebagai komunikator, soalnya kepala desa selalu sibuk, paling kalau kami ada urusan yang penting juga sering diwakilkan sama sekretarisnya dek, dan juga seperti gotong royong juga sudah jarang dilakukan dek sekarang ini.”



Dan berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai Pemimpin Selaku Komunikator Kepala Desa selaku komunikator yang efektif dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari Interaksi terhadap bawahan didalam Kantor sebenarnya sudah dapat dikatakan baik. Namun interaksi diluar Kantor Desa Teluk Rhu kurang berusaha kedekatan personal dengan bawahannya dalam upaya menciptakan keharmonisan dan suasana kerja yang nyaman bagi bawahannya. Kepala Desa mampu mengkomunikasi dengan baik setiap hal yang menjadi arahan dan informasi terhadap bawahannya sehingga bawahannya mengerti setiap instruksi yang diberikan oleh Kepala Desa. Namun untuk komunikasi diluar Kantor Desa masih kurang baik.

#### **4. Pemimpin Selaku Mediator**

Dalam kehidupan organisasional, selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan ke luar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Timbulnya situasi konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pimpinan. Untuk mengatasinya secara rasional, objektif, efektif dan tuntas, dituntut kemampuannya berperan sebagai seorang mediator yang handal.

Mediator adalah orang yang jadi penengah. Dalam ketentuan umum PerMA No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut Joni Emerzon mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap

netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Pemimpin Selaku Mediator yaitu:

1. Mencegah adanya konflik
2. Penyelesaian konflik
3. Pengadaan mediasi

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Pemimpin Selaku Mediator maka dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.10 Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan Indikator Pemimpin Selaku Mediator**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Mencegah adanya konflik	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
2	Penyelesaian konflik	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
3	Pengadaan mediasi	3 (43%)	4 (57%)	-	7 (100%)

Jumlah	14	7	-	21
Rata-rata	5	2	-	7
Presesntase	71%	29%	-	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2019*

Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap indikator Pemimpin Selaku Mediator dengan item yang dinilai mengenai Mencegah Adanya Konflik yakni pemimpin desa Teluk Rhu perlu mengetahui tanda-tanda awal konflik terjadinya konflik, yaitu dengan melihat peningkatan intensitas ketidak sepakatan diantara anggota-anggota dalam suatu organisasi, maka untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 5 orang dengan presentase 71%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 29%, dan kategori kurang baik tidak ada tanggapan dari responden.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Penyelesaian Konflik yakni pemimpin atau kepala desa mampu menyelesaikan konflik yang ada di Desa Teluk Rhu tersebut agar tercapainya tujuan desa yang aman dan tentram. Maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6 orang dengan presentase 86% dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 14% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga responden yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Pada item Ketiga yang dinilai mengenai Pengadaan Mediasi yakni cara penyelesaian sengketa atau konflik melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 43% dan sebanyak 4 orang atau dalam presentase 57% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga responden yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, pada indikator Pemimpin Selaku Mediator dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 5 orang dengan presentase 71%. Artinya Peranan pimpinan di Desa Teluk Rhu Kabupaten Bengkalis dalam suatu organisasi telah dijalankan dengan baik, karena keberadaan pimpinan yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan dalam berorganisasi. Salah satu tugas atau pemimpin yaitu harus bisa mengelola konflik dalam organisasi yang dipimpinnya sehingga setiap konflik itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator Pemimpin Selaku Mediator, mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.11 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pemimpin Selaku Mediator**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Mencegah adanya konflik	8 (14%)	45 (79%)	4 (7%)	57 (100%)
2	Penyelesaian konflik	9 (16%)	43 (75%)	5 (9%)	57 (100%)
3	Pengadaan mediasi	5 (9%)	48 (84%)	4 (7%)	57 (100%)
Jumlah		22	136	13	171
Rata-rata		7	45	4	57
Presesntase		12%	81%	7%	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2019*

Dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator mengenai Pemimpin Selaku Mediator dengan item yang dinilai mengenai Mencegah adanya konflik yakni pemimpin desa Teluk Rhu perlu mengetahui tanda-tanda awal konflik terjadinya konflik, yaitu dengan melihat peningkatan intensitas ketidak sepakatan diantara anggota-anggota dalam suatu organisasi, dalam Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 8 orang dengan presentase 14%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 45 orang dengan presentase 79%, dan kategori kurang baik sebanyak 4 orang dengan presentase 7%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Penyelesaian Konflik yakni pemimpin atau kepala desa mampu menyelesaikan konflik yang ada di Desa Teluk Rhu tersebut agar tercapainya tujuan desa yang aman dan tentram. Maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 9 orang dengan presentase 16% dan sebanyak 43 orang atau dalam presentase 75% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 9%.

Pada item Ketiga yang dinilai mengenai Pengadaan Mediasi yakni cara penyelesaian sengketa atau konflik melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 5 orang dengan presentase 9% dan sebanyak 48 orang atau dalam presentase 84% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga

masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 7%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, pada indikator Pemimpin Selaku Mediator dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 45 orang dengan presentase 81%. Artinya Pada desa Teluk Rhu, Kepala Desa selaku mediator yang andal, khususnya dalam hubungan terutama dalam menangani situasi konflik dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi konflik kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap konflik yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselasikan oleh Kepala Desa

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Mansyur selaku Kepala Desa Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Pembahasan tentang fungsi pimpinan sebagai mediator difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar dihadapi dan diatasi. Dalam sebuah organisasi, dapat saja terjadi konflik baik antara individu yang tergabung dalam satu kelompok kerja, maupun antara berbagai kelompok yang terdapat dalam organisasi. Mengatasi konflik tersebut, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tersebut”

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Suhaili selaku Sekretaris Desa Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam mengatasi konflik tersebut, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tersebut, dan untuk penilaian Pemimpin Sebagai Mediator di Desa Teluk Rhu dirasa sudah berjalan dengan baik, karena setiap ada permasalahan di Desa ini selalu diselesaikan dengan baik dan dengan cara mediasi.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Rudi Kamarudin selaku Ketua BPD, beliau mengatakan bahwa :

“Peranan pimpinan dalam suatu organisasi sangatlah penting karena keberadaan pimpinan yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan dalam berorganisasi. Salah satu tugas atau pemimpin yaitu harus bisa mengelola konflik dalam organisasi yang dipimpinnya sehingga setiap konflik itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan”.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Pada desa Teluk Rhu, Kepala Desa selaku mediator yang andal, khususnya dalam hubungan kedalam, terutama dalam menangani situasi konflik dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi konflik kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap konflik yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselesaikan oleh Kepala Desa.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan yaitu Pada desa Teluk Rhu, Kepala Desa selaku mediator yang andal, khususnya dalam hubungan kedalam, terutama dalam menangani situasi konflik dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi konflik kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap konflik yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselesaikan oleh Kepala Desa. Maka dari itu hasil kuisisioner, serta wawancara mengenai Pemimpin Selaku Mediator dapat digolongkan kedalam kategori “Cukup Baik.”

## **5 Pemimpin Selaku Integritor**

Kenyataan dalam kehidupan organisasional bahwa timbulnya kecenderungan berfikir dan bertindak yang positif, tetapi mungkin pula karena

sikap yang negatif. Dikatakan dapat bersifat positif karena adanya tekad dan kemauan keras di kalangan para anggota organisasi yang tergabung dalam satu kelompok tertentu untuk berbuat seoptimal mungkin bagi organisasi, para anggota organisasi yang bersangkutan lupa bahwa keberhasilan satu kelompok yang bekerja sendirian belum menjamin keberhasilan organisasi sebagai keseluruhan.

Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan ketrampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu diperlukan integrator terutama pada hirarki puncak, yaitu pimpinan. Hanya pimpinanlah yang berada “di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik.

Merupakan kenyataan dalam kehidupan organisasi bahwa timbulnya kecenderungan berfikir dan tidak berkotak-kotak di kalangan para anggota organisasi dapat diakibatkan oleh sikap yang positif, tetapi mungkin pula karena sikap yang negatif. Dikatakan dapat bersifat positif karena adanya tekad dan kemauan yang keras di kalangan para anggota organisasi yang tergabung dalam satu kelompok tertentu untuk berbuat seoptimal mungkin bagi organisasi akan tetapi sikap demikian dapat menyambut dampak negatif bagi kehidupan organisasional apabila dalam berbuat usaha sebaik mungkin bagi organisasi para anggota organisasi yang bersangkutan lupa bahwa keberhasilan satu kelompok yang bekerja sendiri belum menjamin keberhasilan organisasi sebagai keseluruhan.



Sikap mementingkan kelompok dan suatu kerja sendiri mudah timbul lagi dalam organisasi pembagian tugas menuntut spesialisasi yang berlebihan, sistem alokasi dana dan daya yang tidak atau kurang rasional dan penekanan pada pendekatan kesisteman.

Hal-hal demikian biasanya berkaitan pada sesuatu persaingan dikalangan berbagai kelompok kerja yang diupayakan agar suatu kerja sendiri diperlakukan sebagai satuan kerja strategis jika pimpinan organisasi membiarkan persepsi demikian berkembang tidak mustahil bahwa para anggota satuan kerja yang bersangkutan akan berjuang supaya satuan kerja memperoleh alokasi dana, sarana, prasaran dan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan satuan-satuan kerja yang lain mudah menduga bahwa upaya demikian akan membuahkan cara berfikir dan cara bertindak yang berkotak - kotak.

Seorang pimpinan yang efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya sudah barang tentu tidak akan membiarkan cara berfikir dan bertindak demikian karena organisasi yang diharapkan mampu mencapai tujuannya dengan tingkat efisiensi efektifitas dan produktifitas yang tinggi hanyalah organisasi yang bergerak sebagai suatu totalitas meskipun tidak dapat disangkal bahwa suatu organisasi modern akan disusun struktur yang menggambarkan fungsi, tugas dan kegiatan yang keanekaragaman itu tidak menghilangkan perlunya interelisasi dan interdefedensi yang didasarkan pada prinsip simbiosis mutualis artinya, dalam suatu organisasi tidak ada tujuan atau sasaran kelompok yang bersifat *mutually exclusive*.

Memang merupakan kenyataan pula bahwa tergantung pada berbagai desakan tertentu, seperti desakan waktu, desakan skala prioritas, desakan kebijaksanaan baru, desakan perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya, mungkin saja timbul keharusan menunjuk dan memperlakukan satuan kerja tertentu sebagai “satuan kerja strategik”. Situasi keharusan demikian sering dihadapi oleh semua jenis organisasi, didalam dan diluar lingkungan pemerintahan.

Misalnya di lingkungan pemerintahan. Jika pada suatu ketika tertentu terdapat persepsi bahwa keselamatan negara terancam dengan kemungkinan serangan dari pihak asing, angkatan bersenjata negara yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai satuan kerja yang paling strategik atau jika ketertiban masyarakat sangat terganggu oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab seperti perampokan, pencurian, perkosaan, pembunuhan, dan sejenisnya kepolisian negara tersebut akan diperlakukan sebagai satuan kerja strategik atau jika dalam pembangunan nasional ekspor dari hasil agribisnis sangat dominan peranannya dalam penerimaan devisa negara, instansi yang mengurus bidang pertanian di negara yang bersangkutan mungkin sekali akan diperlakukan sebagai satuan kerja strategik. Hanya saja tetap perlu ditekankan bahwa merupakan satuan kerja tertentu sebagai satuan kerja strategik tidak menghilangkan kebutuhan dukungan oleh satuan - satuan kerja lain. Dukungan tersebut dapat bersifat langsung, tetapi tidak pula bersifat tidak langsung. Dengan satuan kerja lain yang dukungannya bersifat langsung, Interaksi yang timbul akan intensif sedangkan

dengan satuan kerja yang dukungannya bersifat tidak langsung bentuk dan jenis interaksi yang timbul pun akan berlainan.

Hal senada dapat dikatakan mengenai organisasi niaga. Tidak mustahil bahwa karena situasi yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan, misalnya meningkatnya permintaan atas produksi yang di hasilkan, bagian mengenai produk di pandang dan di perlakukan sebagai satuan kerja strategik. Akan tetapi jika merebut pasar yang lebih luas menjadi sasaran, bagi pemasarannya yang di perlukan sebagai satuan kerja strategik. Dalam hal produktivitas rendah, disiplin mengendor, tingkat kemangkiran tinggi atau banyak pegawai yang berhenti karena pindah keorganisasi lain, bisa saja satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian menjadi satuan kerja strategik.

Prinsip yang sama berlaku pula bagi organisasi politik jika pada satuan ketika sasaran yang ingin dicapai adalah memperbanyak jumlah anggota organisasi politik yang bersangkutan, dana, daya, waktu dan upaya akan dikerahkan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menjadikan bagian yang paling bertanggung jawab mengenai keanggotaan sebagai satuan kerja strategik. Dalam menghadapi pemilihan umum satuan kerja lain lagi yang menjadi satuan kerja strategik demikian seterusnya.

Dari contoh-contoh diatas terlihat bahwa adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana, dan tenaga, serta di perlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, prilaku dan tidakan yang berkotak-kotak oleh karenanya tidak boleh dibiarkannya berlangsung terus.

Dengan perkataan lain di perlakukan integrator terutama pada hirarkhi puncak organisasi integrator itu adalah pimpinan. Setiap pejabat pimpinan, terlepas dari hirarkhi jabatannya dalam organisasi sesungguhnya adalah integrator hanyalah saja cakupan dan intensitasnya berbeda-beda. Artinya, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hirarkhi kepemimpinan dalam organisasi, semakin penting pula maka ; peranan tersebut hanya pimpinanlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Pemimpin Selaku Integrator yaitu:

1. Mampu menyatukan presepsi
2. Mampu menghilangkan perbedaan
3. Adanya satu tindakan

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang indikator Pemimpin Selaku Integrator maka dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.12 Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan Indikator Pemimpin Selaku Integrator**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Mampu menyatukan presepsi	3 (43%)	4 (57%)	-	7 (100%)
2	Mampu menghilangkan presepsi	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
3	Adanya satu tindakan	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
Jumlah		14	7	-	21
Rata-rata		5	2	-	7
Presesntase		71%	29%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap indikator Pemimpin Selaku Integritor dengan item yang dinilai mengenai Mampu menyatukan persepsi yakni Kepala Desa Teluk Rhu harus bisa menyatukan persepsi masyarakat demi tujuan bersama. Untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 3 orang dengan presentase 43%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 4 orang dengan presentase 57% dan kategori kurang baik tidak ada tanggapan dari responden.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Mampu menghilangkan persepsi yakni pemimpin mampu menghilangkan persepsi masyarakat mengenai hal-hal yang negative atau berdampak untuk melakukan hal negative. Untuk kategori penilaian Baik sebanyak 5 orang dengan presentase 71% dan sebanyak 2 orang atau dalam presentase 29% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga responden yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Pada item Ketiga yang dinilai mengenai Adanya satu tindakan yakni pemimpin harus segera melakukan tindakan seperti konflik-konflik yang terjadi di Desa Teluk Rhu tersebut agar tidak meresahkan masyarakat tersebut. Maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6 orang dengan presentase 86% dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 14% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga responden yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, pada indikator Pemimpin Selaku Integritor dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 5 orang dengan presentase 71%. Artinya Dalam kenyataannya kepala desa Teluk

Rhu Kabupaten Bengkalis tersebut selaku integrator telah atau mampu menyatukan persepsi di forum musyawarah bersama pihak LKMD dan juga BPD, dan juga mampu menghilangkan perbedaan antara pihak lembaga pemerintah desa demi tercapainya tujuan bersama.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator Pemimpin Selaku Integrator, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.13 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pemimpin Selaku Integrator**

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	2	3	4	5	6
1	Mampu menyatukan persepsi	5 (9%)	48 (84%)	4 (7%)	57 (100%)
2	Mampu menghilangkan persepsi	6 (11%)	46 (81%)	5 (8%)	57 (100%)
3	Adanya satu tindakan	7 (12%)	44 (77%)	6 (11%)	57 (100%)
1	2	3	4	5	6
Jumlah		18	138	15	171
Rata-rata		6	46	5	57
Presentase		11%	81%	8%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.13 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator mengenai Pemimpin Selaku Integrator dengan item yang dinilai mengenai Mampu menyatukan persepsi yakni Kepala Desa Teluk Rhu harus bisa menyatukan persepsi masyarakat demi tujuan bersama, untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 5 orang dengan presentase 9%, sedangkan untuk penilaian

cukup baik sebanyak 48 orang dengan presentase 84%, dan kategori kurang baik sebanyak 4 orang dengan presentase 7%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai menghilangkan persepsi yakni pemimpin mampu menghilangkan persepsi masyarakat mengenai hal-hal yang negative atau berdampak untuk melakukan hal negative. Maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6 orang dengan presentase 11% dan sebanyak 46 orang atau dalam presentase 81% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 8%.

Pada item Ketiga yang dinilai mengenai Adanya satu tindakan yakni pemimpin harus segera melakukan tindakan seperti konflik-konflik agar tidak meresahkan masyarakat tersebut. Maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 7 orang dengan presentase 12% dan sebanyak 44 orang atau dalam presentase 77% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 6 orang atau dalam presentase 11%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, pada indikator Pemimpin Selaku Integrator dikategorikan "Cukup Baik" yaitu berjumlah 46 orang dengan presentase 81%. Artinya Pada Desa Teluk Rhu, Kepala Desa selaku integrator yang efektif, rasional objektif dan netral dapat dikategorikan kurang baik hal ini dapat dilihat masih adanya pilih kasih terhadap bawahan yang dilakukan Kepala Desa akhirnya menciptakan kerimpangan pembagian kerja dan kecendrungan antar masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Mansur selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Kenyataan dalam kehidupan organisasional bahwa timbulnya kecendrungan berfikir dan bertindak yang positif, tetapi mungkin pula karena sikap yang negatif. Dikatakan dapat bersifat positif karena adanya tekad dan kemauan keras di kalangan para anggota organisasi yang tergabung dalam satu kelompok tertentu untuk berbuat seoptimal mungkin bagi organisasi, para anggota organisasi yang bersangkutan tak lupa bahwa keberhasilan satu kelompok yang bekerja sendirian belum menjamin keberhasilan organisasi sebagai keseluruhan.”

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Suhaili selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Kepala Desa Teluk Rhu dirasa telah maksimal dalam menjalankan tugasnya, kemauan keras di kalangan para anggota organisasi yang tergabung dalam satu kelompok tertentu untuk berbuat seoptimal mungkin bagi organisasi, para anggota organisasi yang bersangkutan tak lupa bahwa keberhasilan satu kelompok yang bekerja sendirian belum menjamin keberhasilan organisasi sebagai keseluruhan.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Salbaini selaku ketua LKMD/LPM, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam kenyataannya kepala desa selaku integrator telah atau mampu menyatukan persepsi di forum musyawarah bersama pihak LKMD dan juga BPD, dan juga mampu menghilangkan perbedaan antara pihak lembaga pemerintah desa demi tercapainya tujuan bersama”.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa Teluk Rhu, beliau mengatakan bahwa :

“Pada Desa Teluk Rhu, Kepala Desa selaku integrator yang efektif, rasional objektif dan netral dapat dikategorikan kurang baik hal ini dapat dilihat masih adanya pilih kasih terhadap bawahan yang dilakukan Kepala Desa akhirnya menciptakan kerimpangan pembagian kerja dan kecendrungan antar masyarakat desa.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan masih ditemui hambatan. Dan Dari kuisioner mengenai indikator ”Pemimpin Selaku Integrator” yaitu Kenyataan dalam kehidupan organisasional bahwa timbulnya kecendrungan



berfikir dan bertindak yang positif, tetapi mungkin pula karena sikap yang negatif. Dikatakan dapat bersifat positif karena adanya tekad dan kemauan keras di kalangan para anggota organisasi yang tergabung dalam satu kelompok tertentu untuk berbuat seoptimal mungkin bagi organisasi, para anggota organisasi yang bersangkutan lupa bahwa keberhasilan satu kelompok yang bekerja sendirian belum menjamin keberhasilan organisasi sebagai keseluruhan. maka termasuk kedalam kategori “Cukup Baik”.

Selanjutnya hasil rekapulasi tanggapan responden masyarakat mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa, Mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemimpin sebagai penentu arah	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
2	Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
3	Pemimpin sebagai komunikator	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
4	Pemimpin sebagai mediator.	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
5	Pemimpin selaku integrator	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>35</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>7</b>
<b>Presentase</b>		<b>(71%)</b>	<b>(29%)</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Staf Desa, Ketua BPD Dan Ketua LKMD/ LPM mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis yaitu dilihat dari indikator Pemimpin sebagai penentu arah diketahi sebanyak 6 orang atau 86% mengatakan Baik, sebanyak 1 orang atau 14% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan Kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden sementara terhadap indikator Pemimpin Selaku Penentu Arah Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dalam kategori Baik yaitu berjumlah 6 orang atau 86%.

Pada indikator kedua yaitu dilihat dari indikator Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara diketahui sebanyak 5 orang atau 71% yang mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 29% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan Responden Pegawai mengenai Pemimpin sebagai juru bicara berada dalam kategori Baik yaitu berjumlah 5 orang atau 71%.

Pada indikator ketiga yaitu dilihat dari indikator Pemimpin sebagai komunikator diketahui sebanyak 5 orang atau 71% yang mengatakan baik, sebanyak 2 orang atau 29% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara terhadap indikator pengetahuan mengenai pekerjaan dalam kategori Baik yaitu berjumlah 5 orang atau 71%.

Pada indikator keempat yaitu dilihat dari indikator Pemimpin sebagai mediator diketahui sebanyak 5 orang atau 71% yang mengatakan baik, sebanyak 2 orang atau 29% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara mengenai Responden dalam Kategori Baik yaitu berjumlah 5 orang atau 71%.

Pada indikator kelima yaitu dilihat dari indikator Pemimpin selaku integritor diketahui sebanyak 5 orang atau 71% yang mengatakan baik, sebanyak 2 orang atau 29% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara terhadap indikator Pemimpin selaku integritor berada dalam kategori baik yaitu berjumlah 5 orang atau 71%.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, untuk kategori Baik yaitu berjumlah 5 orang atau dalam presentase 71%, untuk kategori Cukup Baik yaitu 2 orang atau dalam presentase 29%, dan juga untuk kategori kurang baik tidak ada.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Baik” dengan Presentase 71% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang presentase 67%-100% termasuk dalam kategori Baik, artinya Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan baik dan segala tugas-tugas

telah dijalankan dengan baik serta pemimpin telah berusaha dengan bersungguh sungguh demi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakatnya.

Setelah pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui bagaimana Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. Maka dilakukan rekapitulasi jawaban responden penelitian dari responden masyarakat yang membawa peneliti dapat melihat apakah Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan baik atau belum, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi dibawah ini :

**Tabel V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat terhadap Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemimpin sebagai penentu arah	13 (27%)	39 (68%)	5 (9%)	57
2	Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara	7 (12%)	47 (83%)	3 (5%)	57
3	Pemimpin sebagai komunikator	9 (16%)	45 (79%)	3 (5%)	57
4	Pemimpin sebagai mediator.	8 (14%)	45 (79%)	4 (7%)	57
5	Pemimpin selaku integrator	6 (11%)	46 (81%)	5 (8%)	57
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>222</b>	<b>20</b>	<b>285</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>57</b>
<b>Presentase</b>		<b>(16%)</b>	<b>(77%)</b>	<b>(7%)</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden masyarakat mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis yaitu dilihat dari Pemimpin sebagai penentu arah diketahi sebanyak 13 orang atau 27% mengatakan Baik, sebanyak 39 orang atau 68% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan Kurang baik berjumlah 5 orang atau 9%. Dengan demikian kesimpulan Responden sementara terhadap Pemimpin Selaku Penentu Arah Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 39 orang atau 68%.

Pada indikator kedua yaitu dilihat dari Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara diketahui sebanyak 7 orang atau 12% yang mengatakan Baik, sebanyak 47 orang atau 83% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik berjumlah 3 orang atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan Responden Pegawai mengenai Pemimpin sebagai juru bicara berada dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 47 orang atau 83%.

Pada indikator ketiga yaitu dilihat dari Pemimpin sebagai komunikator diketahui sebanyak 9 orang atau 16% yang mengatakan baik, sebanyak 45 orang atau 79% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik berjumlah 3 orang atau 5%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara terhadap indikator pengetahuan mengenai pekerjaan dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 45 orang atau 79%.

Pada indikator keempat yaitu dilihat dari Pemimpin sebagai mediator diketahui sebanyak 8 orang atau 14% yang mengatakan baik, sebanyak 45 orang

atau 79% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik berjumlah 4 orang atau 7%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara mengenai Responden dalam Kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 45 orang atau 79%.

Pada indikator kelima yaitu dilihat dari Pemimpin selaku integritor diketahui sebanyak 6 orang atau 11% yang mengatakan baik, sebanyak 46 orang atau 81% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik berjumlah 5 orang atau 8%. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara terhadap indikator Pemimpin selaku integritor berada dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 46 orang atau 81%.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden Masyarakat mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, masyarakat yang berjumlah 57 orang. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan "Cukup Baik" dengan presentase 77%. Artinya menurut responden masyarakat Kepala Desa Teluk Rhu telah menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi masih juga ditemui masalah-masalah yang terjadi di Desa Teluk Rhu Tersebut. Seperti sarana dan prasarana yang tidak dijaga dengan baik, serta Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi konflik kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap konflik yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselesaikan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil observasi mengenai indikator Pemimpin Sebagai Penentu Arah, Pemimpin Sebagai Wakil dan Juru Bicara, Pemimpin Sebagai Komunikator,

Pemimpin Selaku Mediator, dan Pemimpin Selaku integritor sudah berjalan dengan baik dan segala tugas-tugas telah dijalankan dengan baik serta pemimpin telah berusaha dengan bersungguh sungguh demi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi tetapi masih juga ditemui masalah-masalah yang terjadi di Desa Teluk Rhu Tersebut, yakni sarana dan prasarana yang telah dibangun atau yang sudah tersedia tidak dapat dijaga dengan baik, sehingga mengalami kerusakan-kerusakan, kurang dekatnya Kepala Desa dengan masyarakat yang ia layani dan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat Desa Teluk Rhu seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mengenai pemimpin selaku penentu arah kepala desa sampai saat ini telah memberikan motivasi ataupun program-program yang akan dijalankan, Mengenai pemimpin selaku wakil dan juru bicara sudah berjalan dengan baik, seperti program-program yang akan dijalankan selalu bermusyawarah terlebih dahulu dan juga kepala desa sudah maksimal mengenai pemeliharaan hubungan diluar serta diluar organisasi.

**C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**

Pada Desa Teluk Rhu, Kepala Desa yang menjalankan fungsi kepemimpinan yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan dapat dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan :

- a. Sarana dan prasarana yang tersedia tidak dapat dijaga dengan baik, contohnya sarana dan prasarana yang telah dibangun atau yang sudah tersedia tidak dapat dijaga dengan baik, sehingga mengalami kerusakan-

kerusakan, sehingga disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai penentu arah belum terlaksana dengan baik.

- b. Pada desa Teluk Rhu, Kepala Desa selaku wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak diluar organisasi masih terdapat kelemahan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kurangnya pertemuan-pertemuan dengan pihak luar desa seperti hubungan dengan dinas perhubungan dalam acara gerakan bersih laut dan pantai yang diadakan setiap tahunnya dan juga dengan polsek Rupert Utara mengenai penanaman pohon.
- c. Pada Desa Teluk Rhu, Kepala Desa selaku komunikator yang efektif dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari : a. Interaksi terhadap bawahan didalam Kantor sebenarnya sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi interaksi di dalam Kantor Desa Teluk Rhu kurang berusaha kedekatan personal dengan bawahannya dalam upaya menciptakan keharmonisan dan suasana kerja yang nyaman bagi bawahannya. b. Kepala Desa mampu mengkomunikasi dengan baik setiap hal yang menjadi arahan dan informasi terhadap bawahannya sehingga bawahannya mengerti setiap instruksi yang diberikan oleh Kepala Desa.
- d. Pada Kantor Desa Teluk Rhu, Kepala Desa selaku mediator yang handal, khususnya dalam hubungan dengan masyarakat, terutama dalam menangani situasi konflik yang terjadi ditengah masyarakat dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi konflik kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap



konflik yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselesaikan oleh Kepala Desa, contohnya yaitu perbedaan pendapat antar masyarakat sehingga sarana dan prasarana yang telah dibangun mengalami kerusakan.

- e. Pada Kantor Desa Teluk Rhu, Kepala Desa selaku integrator yang efektif, rasional objektif dan netral dapat dikategorikan kurang baik hal ini dapat dilihat masih adanya pilih kasih terhadap bawahan yang dilakukan Kepala Desa akhirnya menciptakan krimpangan pembagian kerja dan kecendrungan antar pegawai Desa teluk rhu tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kepemimpinan Desa Teluk Rhu dapat di katagorikan baik, pada fungsi kepemimpinannya selaku penentu arah yang baik yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan ( stategi dan taktik, serta mengambil keputusan), serta fungsi dalam komunikator yang efektif ( memiliki interaksi yang baik terhadap bawahan) dan fungsi sebagai mediator yang handal khususnya dalam hubungan yang kedalam terutama dalam menangani konflik (mampu menyelesaikan konflik didalam kantor dengan baik).
2. Sedangkan untuk analisa Fungsi Kepemimpinan Desa Teluk Rhu juga terdapat beberapa fungsi kurang dijalankan dengan baik yaitu fungsi pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan (sarana dan prasarana yang kurang lengkap), fungsi wakil dan juru bicara organisasi (hubungan yang kurang terjalin dengan baik seperti kepada masyarakat tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberkan pelayanan), fungsi komunikator yang efektif ( kurang memiliki komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berada diluar kantor kecamatan), fungsi pimpinan sebagai mediator ( Camat kurang peka terhadap konflik-

konflik yang terjadi diluar kantor kecamatan yang terdapat didalam masyarakat yang ia pimpin), serta fungsi kepemimpinanya selaku integrator yang efektif ( adanya pilih kasih terhadap bawahan yang menimbulkan ketimpangan pembagian kerja).

3. Faktor-faktor penghambat dalam Analisis Fungsi Kepemimpinan Desa Teluk Rhu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut : a. Sarana dan prasarana b. Hubungan yang kurang terjalin dengan baik c. Kurang memiliki komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. d. Menyelesaikan konflik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pemimpin sebagai komunikator di harapkan agar Kepala Desa Teluk Rhu mampu menjelaskan serta mampu mempengaruhi masyarakat nya agar menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun, serta mengkoordinasikan bersama masyarakat desa teluk Rhu agar senantiasa menjaga dan memelihara sarana dan prasarana tersebut.
2. Kepala Desa sebagai wakil juru bicara diharapkan memiliki jadwal tetap untuk turun kelapangan dan mulai membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat yang ia pimpin serta dengan berbagai pihak diluar kantor Desa, seperti hubungan dengan Polsek Rupt Utara serta dengan Dinas Perhubungan, demi terselenggaranya acara gerakan bersih pantai

yang diadakan setiap tahunnya, dan juga kedepannya dapat lebih fokus untuk melakukan interaksi secara langsung kepada pegawainya dalam bekerja. Sehingga pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

3. Kepala Desa sebagai integrator harus membangun kembali jiwa gotong royong kepada masyarakat desa teluk rhu tersebut.
4. Kepala desa sebagai mediator harus mampu menyelesaikan konflik yang ada di Desa Teluk Rhu Tersebut, seperti perbedaan pendapat antar masyarakat sehingga sarana dan prasarana yang telah dibangun tidak mengalami kerusakan.
5. Kepala Desa sebagai integritor harus bersifat adil dan juga tidak pilih kasih terhadap bawahannya ataupun masyarakat yang bukan saudara dekat, agar tidak terjadi kesalah fahaman antar masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anggara, sahya, 2012. Ilmu administrasi negara. Bandung, Pustaka setia.
- Athoillah, anton, 2010. Dasar-dasar manajemen. Cetakan I. Bandung, pustaka setia
- Ibrahim, amin. 2009. Pokok-pokok administrasi publik dan implementasinya. Cetakan ke II. Bandung, refika aditama.
- Handoko hani. T, 1984. Manajemen , BPFE-yogyakarta, yogyakarta
- Hanim, sufiyan, 2005. Administrasi, organisasi dan manajemen UIR press, pekanbaru.
- Hasibuan, melayu, 2009. Manajemen dasar, pengertian dan masalah. Cetakan kedelapan jakarta, bumi aksara, jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2006. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nyoman,sumariady.2005. efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah. Jakarta, CV. Citra utama:
- Kartono, kartini. 2010. Pemimpin dan kepemimpinan, PT Raja Grafinda Persada : jakarta
- Harbani, Pasalong. 2013. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung, CV Alfabeta.
- Lako, Anderes, 2014. Kepemimpinan Kinerja Organisasi Isu Teori dan Solusi. Yogyakarta : Amara Book.
- Melayu, Hasibuan.2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet ketiga, Penerbit, Bumi Arkasa, jakarta.
- Harbani, Pasalong. 2012. Metode Penelitian administrasi Publik, Alfabeta Bandung,
- Riduwan , Ismail. 2009. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung.
- Sugiono , 2012. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung .
- Siagian, Sondang. 2008. P. Filsafat Ilmu Administrasi. Bumi Aksara.
- Sugiyono,2003. Metode penelitian administrasi. Bandung, alfabeta.
- Zulkifli, 2005. Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen. Pekanbaru: UIR press

Syafiie, inu kencana. 2006. Ilmu administrasi publik edisi revisi. Jakarta. Rineka cipta.

Terry, georg, 2012. Dasar-dasar manajemen. Cetakan ke XIII. Bumi aksara. Jakakarta.

### **Dokumentasi**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

